


KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA



KOMPILASI KLIPING MEDIA CETAK KEMENTERIAN PERTANIAN RI

07 JUNI 2024

-Biro Humas dan Informasi Publik-

Title	Data Penerima Pupuk Subsidi Diperbarui tiap Empat Bulan	
Date	7 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	5	
Author	Ant/E-10	

Data Penerima Pupuk Subsidi Diperbarui tiap Empat Bulan

JAKARTA - Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi mengatakan pemerintah membuka ruang untuk memperbarui data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) setiap empat bulan sekali, dimulai pada 5-18 Juni 2024.

“Bagi petani yang belum bisa mendapatkan pupuk bersubsidi karena tidak terdata di RDKK 2024, ruang ini adalah momen untuk mendaftar ke dalam RDKK dengan menghubungi penyuluh di wilayah kecamatannya masing-masing,” ujar Tri Wahyudi, di Jakarta, Kamis (6/6).

Tri Wahyudi menegaskan salah satu poin penting dari perubahan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 menjadi Permentan 01/2024, yaitu data RDKK dapat dievaluasi di tahun berjalan atau setiap caturwulan sekali. Sedangkan, di beleid sebelumnya data ini tidak bisa diubah di tahun berjalan.


“Update yang dijadwalkan hingga 18 Juni mendatang adalah *update* perdana,” kata Tri Wahyudi.

Adapun syarat petani agar bisa terdata di RDKK dan menjadi penerima manfaat pupuk bersubsidi, sesuai Permentan 1/2024, mereka harus menggarap lahan maksimal 2 hektare dan tergabung dengan kelompok tani (poktan).

Petani juga melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan padi, jagung, dan kedelai, serta subsektor tanaman hortikultura cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan subsektor perkebunan tebu rakyat, kakao, dan kopi. Dia menambahkan, update RDKK yang saat ini dilakukan pemerintah tidak hanya menginput petani yang sebelumnya tidak terdata di RDKK.

Akan tetapi, petani juga bisa menambahkan luas lahan dan pupuk pada musim tanam tertentu yang sebelumnya tidak masuk dalam RDKK. “Untuk dua perubahan ini akan ada verifikasi dan persetujuan berjenjang, sampai dengan kepala dinas pertanian setempat,” ujar Tri Wahyudi.

■ Ant/E-10

Title	Dunia Capai Rekor Suhu Tertinggi dalam Sejarah	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	12	
Author	SB/N-3	

Pemanasan Global

Dunia Capai Rekor Suhu Tertinggi dalam Sejarah

BRUSSELS - Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, pada Rabu (5/6), menyerukan tindakan segera untuk mencegah "iklim neraka", bersamaan dengan badan pemantauan perubahan iklim Uni Eropa yang melaporkan periode 12 bulan terakhir ini menduduki peringkat terpanas dalam sejarah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dikutip dari *The Straits Times*, Layanan Perubahan Iklim Copernicus melaporkan suhu rata-rata global selama periode 12 bulan hingga akhir Mei adalah 1,63 derajat Celsius di atas rata-rata pra-industri, menjadikannya periode terpanas sejak pencatatan dimulai pada tahun 1940.

Rata-rata suhu dalam 12 bulan ini tidak berarti dunia telah melampaui ambang batas pemanasan global sebesar 1,5 derajat Celsius, yang menggambarkan suhu rata-rata selama beberapa dekade, dan jika melampauinya para ilmuwan memperingatkan akan adanya dampak yang lebih ekstrem dan tidak dapat diubah.

Dalam laporan terpisah, Organisasi Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organisation (WMO) mengatakan saat ini ada kemungkinan 80 persen setidaknya satu dari lima tahun ke depan akan menandai tahun kalender pertama dengan suhu rata-rata yang untuk sementara melebihi 1,5 derajat Celsius di atas suhu tingkat industri sebelumnya, naik dari peluang

66 persen pada tahun 2023.

Berbicara mengenai temuan ini, Guterres menekankan betapa cepatnya dunia menuju ke arah yang salah dan tidak mampu menstabilkan sistem iklimnya. "Pada tahun 2015, kemungkinan pelanggaran semacam itu mendekati nol," kata Guterres dalam pidatonya pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Ketika waktu untuk membalikkan keadaan semakin menipis, Guterres mendesak pengurangan 30 persen produksi dan penggunaan bahan bakar fosil global pada 2030.

Penyebab Utama

Emisi karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil, penyebab utama perubahan iklim, mencapai rekor tertinggi pada tahun 2023 meskipun terdapat perjanjian global yang dirancang untuk membatasi pelepasan

bahan bakar fosil dan adanya ekspansi pesat dalam energi terbarukan.

Batu bara, minyak, dan gas masih menyediakan lebih dari tiga perempat energi dunia, dengan permintaan minyak global yang tetap kuat.

"Data iklim terbaru menunjukkan bahwa dunia jauh dari jalur dari tujuannya untuk membatasi pemanasan hingga 1,5 derajat Celsius, target utama Perjanjian Paris tahun 2015," kata Wakil Sekretaris Jenderal WMO, Ko Barrett.

"Kita harus segera berbuat lebih banyak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, atau kita akan menanggung akibat yang semakin besar dalam bentuk kerugian ekonomi senilai triliunan dollar AS, jutaan nyawa yang terkena dampak cuaca ekstrem, dan kerusakan besar terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati," tutur Barrett. ■ SB/N-3



ISTIMEWA

Suhu rata-rata global selama periode 12 bulan hingga akhir Mei adalah 1,63 derajat Celsius di atas rata-rata suhu pra-industri.

Title	Harga Beras Naik
Date	7 Juni 2024
Media	Koran Jakarta
Page	5
Author	Antara/Asep Fathulrahman




» Harga Beras Naik



ANTARA/ASEP FATHULRAHMAN

» Pekerja mengangkut beras di Pasar Induk Rau Serang, Banten, Rabu (5/6). Menurut pedagang harga beras kualitas premium dan medium mengalami kenaikan 1.000 rupiah per kilogram akibat masa panen berakhir hingga suplai beras mulai berkurang.

Title	Panglima: TNI Bukan Lagi Dwifungsi, tapi Multifungsi	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	3	
Author	Ant/S-2	

Peran TNI

Panglima: TNI Bukan Lagi Dwifungsi, tapi Multifungsi

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyatakan bahwa saat ini TNI bukan lagi dwifungsi, tetapi multifungsi karena korps militer itu berperan di berbagai sektor dalam membantu pemerintah.

"Sekarang di Papua yang ngajar itu anggota saya, TNI, kemudian pelayanan kesehatan anggota saya, terus kalian mau menyebut dwifungsi atau multifungsi sekarang," kata Agus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/6), saat ditanya wartawan mengenai kekhawatiran kembalinya Dwifungsi ABRI melalui Revisi Undang-Undang TNI.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa saat ini banyak kementerian yang bekerja sama dengan TNI, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian BUMN, sehingga hal ini membuktikan bahwa berbagai kementerian pun membutuhkan peran TNI.

Dia pun memaknai bahwa poin terkait jabatan sipil yang



RAKER HIBAH ALPALHANKAM | Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra (kanan) bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6). Rapat Kerja tersebut membahas soal Persetujuan Penerimaan Hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari dan/ke Luar Negeri.

bisa diisi oleh TNI dalam RUU tersebut adalah agar TNI yang menduduki jabatan tersebut bisa menyelesaikan tugas-tugasnya secara lancar.

"Sekarang bukan Dwifungsi ABRI lagi, multifungsi ABRI, ada bencana kita di situ, ya

kan? Jadi jangan berpikiran seperti itu," katanya.

Dia pun memastikan bahwa penempatan TNI di sektor non pertahanan, salah satunya untuk mempercepat pembangunan di wilayah yang membutuhkan peran TNI, se-

hingga kebijakan pemerintah bisa terlaksana.

"Kita berpikirnya untuk kemajuan NKRI, untuk membantu program-program pemerintah," katanya.

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengatakan bahwa tenaga dari TNI masih diperlukan untuk menangani permasalahan. Meski begitu, dia pun tak menafikan atas adanya kekhawatiran itu karena adanya sejarah yang traumatis.

"Kita negara demokrasi kok, itu kan zaman dulu, jangan dibandingkan, oke lah ada traumatis masa lalu, tapi mari kita lihat dalam kondisi sekarang ini," kata Herindra.

Rapat Kerja Pertama

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI untuk pertama kalinya bersama Panglima TNI, dan jajaran Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

"Pak Kasau Marsekal Mohammad Tonny Harjono, ini rapat kerja pertama dengan Komisi I, betul? Kami ucapkan juga selamat semoga sukses dalam mengemban amanah barunya," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid yang memimpin jalannya rapat.


Meutya juga menyapa pemimpin dua mata TNI lainnya, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jendral Maruli Simanjuntak dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, termasuk Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Menteri Keuangan Sri Muliyani Indrawati juga berhalangan hadir dan diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kementerian Keuangan Suminto.

Agenda rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Panglima TNI, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan itu membahas terkait persetujuan penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dari dan ke luar negeri. ■ **Ant/S-2**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Produksi Garam	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	6	
Author	Antara/Basi Marzuki	

» Produksi Garam



ANTARA/BASRI MARZUKI

» Buruh menurunkan garam yang didatangkan dari Makassar di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (5/6). Sejumlah pedagang mengaku terpaksa mendatangkan garam dari Makassar untuk memenuhi permintaan lokal karena produksi garam setempat tidak cukup karena tidak berproduksi untuk sementara waktu karena faktor cuaca.

Title	PEMERINTAH PERLU CARI WAKTU TEPAT TERAPKAN B40
Date	7 Juni 2024
Media	Bisnis Indonesia
Page	5
Author	Dwi Rachmawati



| INDUSTRI KELAPA SAWIT |

PEMERINTAH PERLU CARI WAKTU TEPAT TERAPKAN B40

Bisnis, JAKARTA — Indonesia disarankan mempertimbangkan waktu yang tepat untuk mengimplementasikan bauran Solar dengan 40% bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit atau Biodiesel B40.

Dwi Rachmawati
redaksi@bisnis.com

Direktur Eksekutif PalmOil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan bahwa implementasi program Biodiesel B40 bisa memberikan manfaat besar bagi perekonomian nasional.

"Cuma *timing* yang perlu diperhatikan, misalnya, kalau itu [Biodiesel B40] tidak dibutuhkan untuk mendorong harga internasional, tidak perlu kita pakskakan," katanya sesuai diskusi di Jakarta, Kamis (6/6).

Menurutnya, keberadaan Biodiesel B40 bakal menjadi *game changer* penggunaan bahan bakar nabati di pasar internasional. Saat ini, Indonesia dianggap berperluang memantik gairah pasar internasional lewat B40 atau bahkan B50 berbasis minyak kelapa sawit.

"Pasar internasional perlu kita gerakkan pakai B40. Ini kan instrumen kita selain untuk substitusi impor," tuturnya.

Dia juga menghitung program mandatori Biodiesel B40 bisa menghemat devisa negara hingga US\$15 miliar atau sekitar Rp243,9 triliun.

Menurutnya, Indonesia bisa menghemat hingga belasan miliar dolar saat mandatori biodiesel B40 diimplementasikan.

"Tahun lalu kita bisa menghemat US\$11 miliar, kalau naik jadi B40 itu bisa [hemat] US\$13 miliar—US\$15 miliar, tergantung harga solar internasional," ujarnya.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan program Biodiesel B40 bisa dieksekusi pada 2025. Pemerintah memperkirakan stok minimal minyak kelapa sawit

untuk menopang program Biodiesel B40 sekitar 17,57 juta kiloliter. Hitung-hitungan itu berasal dari asumsi kebutuhan solar pada 2024 sebesar 38,04 juta kiloliter.

Dengan asumsi pertumbuhan rerata produk domestik bruto (PDB) sebesar 5%, penyaluran B40 diperlukan stok CPO domestik sekitar 17,57 juta kiloliter atau sekitar 15,29 juta ton CPO.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengklaim program mandatori biodiesel telah meningkatkan nilai tambah produk sawit.

Sejak diluncurkan pertama kali pada 2009, penggunaan minyak sawit dalam komposisi biodiesel terus melonjak, dari sebelumnya 0,7 juta kiloliter CPO, naik menjadi mencapai 12 juta kiloliter pada tahun ini.

"Bila volume penggunaan 12 juta kiloliter sudah mencapai US\$7,9 miliar dan peningkatan nilai tambah dari CPO menjadi biodiesel sekitar Rp15,85 triliun," kata Eniya.

Sebaliknya, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menyebutkan Indonesia berpotensi jadi importir minyak sawit akibat pengembangan biodiesel.

Menurutnya, produktivitas kelapa sawit petani swadaya masih jauh dari normal yaitu hanya sekitar 300 kilogram—400 kilogram tandan buah segar (TBS) per hektare per bulan.

Di sisi lain, kebutuhan minyak sawit untuk energi di dalam negeri terus meningkat dengan adanya pengembangan biodiesel (solar campur minyak sawit).

Apalagi, pemerintah berencana melakukan pen-

gangan biodiesel hingga mencapai B50. Saat ini, program biodiesel yang telah berjalan yaitu B35 atau campuran minyak sawit 35% dalam Solar.

Produktivitas kebun kelapa sawit yang rendah, katanya, mengancam pasokan untuk pemenuhan minyak sawit sebagai bahan baku energi maupun pangan.

"Kalau itu mimpi B50, kita sudah jadi importir CPO 1,2 juta ton per tahun dengan kondisi [produksi] saat ini," ujar Gulat.

Menurutnya, Indonesia bakal kehilangan hingga Rp130 triliun per tahun jika harus menjadi importir CPO.

Oleh karena itu, Gulat menegaskan bahwa peremajaan sawit rakyat (PSR) harus menjadi prioritas. Melalui program replanting, produktivitas kepala sawit petani disebut dapat melonjak hingga 3.500 kilogram TBS per hektare per bulan.

Namun, Gulat menegaskan program PSR yang dinahkodai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) masih jauh dari harapan.

Sejak diluncurkan pada 2017, kata Gulat, realisasi PSR saat ini hanya mencapai 323.000 hektare dari target 500.000 hektare.

Dia mengganggap tumpang tindih kebijakan menjadi faktor utama minimnya realisasi peremajaan sawit di kalangan petani swadaya.

Gulat pun menyinggung soal aturan kebun sawit di dalam kawasan hutan UU Cipta Kerja Pasal 110B yang dianggap merugikan dan memperburuk produksi sawit nasional.

Dia menyebutkan ada sekitar 2,8 juta hektare lahan sawit yang dianggap masuk dalam kawasan hutan tidak boleh dilakukan replanting akibat beleid tersebut. "Lima tahun lagi kita kehilangan 12 juta ton CPO per tahun. Banyak

“Pasar internasional perlu kita gerakkan pakai B40. Ini kan instrumen kita selain untuk substitusi impor.”

sekaligus penemuan baru.

SANGAT KRUSIAL

Menurutnya, peremajaan kebun kelapa sawit rakyat menjadi krusial untuk menggenjot produksi minyak sawit nasional. Urgensi itu muncul seiring rendahnya produktivitas kebun kelapa sawit petani swadaya yang jauh di bawah produktivitas normal.

Gulat menuturkan, para petani sawit yang tergabung dalam asosiasi juga telah mengusulkan mandatori PSR kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dia pun berharap Prabowo mewujudkan harapan petani untuk bisa menikmati peremajaan tanaman sawit dengan biaya ditanggung pemerintah.

"Karena produksi petani cuma 30% dari yang seharusnya. Karena itu solusinya adalah *replanting*, PSR harus dimandatorikan dengan dana Rp60 juta per hektare," ucapnya.

Gulat juga mendesak agar dibentuk sebuah badan khusus untuk mengurus tata kelola sawit di Indonesia.

Badan Sawit diklaim dapat mempermudah implementasi program PSR dengan kebijakan yang lebih mudah alias ti-

dak tumpang tindih.

"Permasalahannya kenapa petani saat ini tidak mau *replanting*? karena peraturannya ini [sulit]," tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan pemerintah menetapkan dana PSR dari sebelumnya Rp30 juta per hektare menjadi Rp60 juta per hektare.

Dalam program PSR, pekebun sawit rakyat bisa mendapatkan dana bantuan tersebut dengan maksimal luasan kebun 4 hektare pada tahun pertama.

Untuk tahun kedua dan selanjutnya, pekebun dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan batas maksimal pagu Rp500 juta rupiah dengan bunga 6% per tahun.

Dia mengatakan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit akan kembali dilanjutkan untuk periode 2024 hingga 2029. Rencana aksi nasional ini sebelumnya mengacu pada Instruksi Presiden No. 6/2019 untuk periode 2019 hingga 2024.

"Kita berharap dengan kenaikan biaya menjadi Rp60 juta nanti tidak hanya pada tahun pertama, tapi tahun kedua dan ketiga bisa dibiayai untuk penghidupan para pekebun," jelas Airlangga.

Data pemerintah mencatat telah menyalurkan dana bantuan PSR melalui BPDPS sebesar Rp9,2 triliun dengan luasan lahan 331.007 hektare.

Dari Medan, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disubnak) Sumatera Utara mengabarkan adanya kenaikan harga TBS sawit yang diproduksi petani mitra Provinsi Sumut hingga menyentuh Rp2.883,82 per kilogram pada periode ini.

Perkembangan harga TBS itu terbilang cukup tertahan karena belum beranjak dari level Rp2.800-an sepanjang Mei 2024.

Periode lalu, TBS sawit petani bermitra Sumut ditetapkan Rp2.857,61 per kilogram.

"Ada kenaikan sedikit, sekitar Rp26,21 dari periode sebelumnya," kata Analis Pasar Disubnak Sumatera Utara Dewiana.

Pergerakan harga komoditas unggulan Sumut ini sejalan dengan perkembangan harga pasar minyak sawit mentah.

Dewiana menyebutkan rata-rata harga CPO lokal dan ekspor saat ini Rp12.293,62 per kilogram atau lebih tinggi sekitar 116 poin dari sebelumnya Rp12.176,79 per kilogram.

Begitupun pada harga kernel lokal yang berada di level Rp7.555,43, dari sebelumnya Rp7.509,42 per kg, dengan faktor "K" sebesar 92,24%.

"Harga TBS dan faktor 'K' ini didasarkan pada harga yang diperoleh dari Pusat Pemasaran Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara, GAPKI, dan harga pasar," lanjutnya. (Delfi Rismayeti) ❊



Bak dua sisi mata uang, program bauran solar dengan 40% bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit atau Biodiesel B40 bisa memicu penurunan volume ekspor sekaligus menghemat devisa negara.

Sumber: Gapki, BPS, diolah

BISNIS/RADITYA EKO

Volume Ekspor Minyak Sawit Indonesia (ribu ton)

Jenis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CPO	6.554	7.399	7.171	2.482	3.463	3.262
Olahan CPO	23.822	23.677	21.103	25.481	24.410	22.736
CPKO	369	651	301	52	107	39
Olahan CPKO	1.484	1.396	1.529	1.458	1.335	1.242
Biodiesel	1.356	1.090	31	167	435	308
Oleokimia	2.746	3.218	3.871	4.036	4.179	4.638
Total Ekspor	36.333	37.430	34.007	33.674	33.928	32.215


Ket: CPO: minyak sawit mentah, CPKO: minyak inti sawit

Luas Area Kebun Sawit Indonesia (juta hektare)



Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERAN

Title	STABILITAS HARGA SEMBAKO	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	11	
Author	Antara/Asep Fathurahman	


■ STABILITAS HARGA SEMBAKO



Antara/Asep Fathurahman

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (*kiri*) membagikan beras Bulog kepada warga saat melakukan inspeksi ke Pasar Kelapa, Cilegon, Banten, Kamis (6/6).

Inspeksi tersebut dilakukan untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga-harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Iduladha 1445 H.

Title	Harga Beras Biasanya Naik Jelang Idul Adha	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	9	
Author	IMA	

Bapanas Kudu Sigap Ambil Langkah Antisipasi

Harga Beras Biasanya Naik Jelang Idul Adha

Harga beras biasanya mengalami kenaikan menjelang hari Raya Idul Adha. Untuk itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) perlu mengambil langkah antisipasi agar kenaikan tidak melonjak tinggi seiring Pemerintah sudah memutuskan memperpanjang relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.

PENGAMAT kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah lalu mengingatkan, pada bulan ini ada perayaan hari besar, yakni Idul Adha atau Lebaran Haji.

“Setiap mendekati hari besar tertentu, harga kebutuhan pangan seperti beras, biasanya naik. Tapi, setelahnya turun lagi karena berkaitan dengan *supply and demand*,” ujar Trubus kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Karena itu, Trubus berpendapat, Pemerintah melalui Bapanas maupun Perum Bulog harus sigap melakukan langkah-langkah stabilisasi harga di tengah kondisi tersebut. Terlebih, HET beras ikut mengalami perubahan. Rata-rata naik Rp 1.000 per kilogram (kg).

Sebagai informasi, melalui surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada *stakeholder* perberasan, Nomor 160/TS.02.02/K/5/2024 tertanggal 31 Mei 2024, perpanjangan Relaksasi HET Beras Premium dan Beras Medium berlaku sampai dengan terbitnya Peraturan Badan Pangan Nasional, tentang Perubahan atas Perbadan (Peraturan Badan Pangan) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.

Adapun besaran relaksasi HET beras premium di sejumlah wilayah, seperti untuk Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan relaksasi HET sebesar Rp 14.900 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 13.900 per kg.

Lalu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Ke-

pulauan Riau, Riau, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung relaksasi HET sebesar Rp 15.400 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 14.400 per kg.

Sementara Bali dan Nusa Tenggara Barat relaksasi HET sebesar Rp 14.900 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 13.900 per kg, Nusa Tenggara Timur relaksasi HET sebesar Rp 15.400 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 14.400 per kg.

Begitu juga, relaksasi HET beras medium ikut mengalami perubahan. Di antaranya di Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan relaksasi HET sebesar Rp 12.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 10.900 per kg. Besaran HET tersebut, berbeda di tiap wilayah di Indonesia.

Ia berharap, penyesuaian HET ini tidak memberatkan di tingkat konsumen. Walaupun perubahan HET beras ini memang baik bagi para petani.

“Jangan sampai kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan satu pihak. Makanya, Bapanas dan Bulog harus bisa menjaga stabilisasi harga beras saat ini. Diskusikan juga dengan asosiasi perberasan,” usul Trubus.

Menurutnya, program bantuan pangan Pemerintah, yakni dengan cara Bulog menyalurkan beras kepada masyarakat yang membutuhkan, masih menjadi langkah tepat dalam menjaga stabilisasi harga beras di pasaran.

Begitu juga, program terkait pangan lainnya seperti beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga



Arief Prasetyo Adi

Pangan) yang ditujukan pada masyarakat segmen menengah.

“Program bantuan pangan ini tetap dijalankan saja. Karena yang juga harus dijaga kan daya beli masyarakat itu sendiri,” ucapnya.

Terpisah, dalam program Squawk Box, *CNBCIndonesia*, pada Kamis (6/6/2024), Direktur Transformasi & Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, Sonya Mamoriska menerangkan, perubahan HET ini merupakan kebijakan yang diambil Pemerintah di tingkat konsumen agar harga beras di pasaran tetap terjangkau.

Sekaligus menunjukkan sinyal, bahwa Pemerintah tahu kapan intervensi pasar harus dilakukan.

Sonya mengakui, ada beberapa hal yang jadi alasan kenapa harga beras ini naik. Salah satunya, keterbatasan pasokan akibat produksi belum banyak di awal tahun. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti iklim, ketersediaan pupuk, produksi yang stagnan bahkan cenderung turun.

“Serta ketersediaan pasokan pada pelaku perberasan, hingga tingginya permintaan saat masa Pemilu (Pemilihan Umum) lalu,” bebemnya.

Menurut Sonya, perkembangan harga beras ini memiliki pola yang sama tiap tahun. Yakni, harga beras akan naik di awal tahun, lalu turun saat panen raya dan kembali naik saat akhir tahun, ketika musim tanam untuk panen selanjutnya.

“Pola ini yang menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan, dengan menyimpan stok dan penyebaran stok di sepanjang tahun itu,” katanya.

Bagi Bulog, kata dia, penyesuaian HET beras ini menjadi acuan bagi perusahaan dalam melakukan intervensi ke pasar, dengan melepas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog, melalui program SPHP.

“Sehingga masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau,” katanya.

Saat ini, pihaknya terus berupaya melakukan penyerapan beras dalam negeri sebanyak-banyaknya.

Pihaknya mencatat, realisasi penyerapan beras dalam negeri, atau sekitar 570 ribu ton untuk beras PSO (*Public Service Obligation*) dan 100 ribu ton beras komersial, dari target yang ditetapkan tahun ini sebanyak 900 ribu ton, baik setara gabah kering giling maupun beras.

“Bulog cukup baik melakukan penyerapan tersebut, yang akan membantu program-program kami terus berjalan dalam intervensi pasar,” katanya.

Ia tak menampik, harga beras saat ini sulit turun dikarenakan sangat dipengaruhi banyak faktor. Dan posisi *supply and demand* yang menjadi faktor utama dalam penentu harga beras.

“Biasanya, petani akan mempertimbangkan biaya produksinya dan keuntungan yang bisa diperoleh. Termasuk, harga

beras di konsumen itu juga jadi pertimbangan untuk menetapkan harga gabah,” sambungnya.

Ia menegaskan, saat ini Indonesia mengalami hal serius terkait hasil produksi. Sebab, ketika produksi beras dalam negeri berkurang, Bulog akan kesulitan melakukan penyerapan gabah dengan optimal karena keterbatasan hasil produksi.

“Tapi, dengan adanya panen raya dan masuknya beras impor secara bertahap, membuat Bulog masih dapat melaksanakan stabilisasi harga yang ditugaskan Pemerintah,” imbuhnya.

Ia juga menekankan, bahwa petani diharapkan bisa menikmati hasil panennya secara wajar.

“Sehingga harga beras ini tetap menguntungkan bagi konsumen dan petani, tidak hanya satu pihak saja,” katanya.

Di kesempatan berbeda, Kepala Bapanas atau National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, HET saat ini merupakan langkah strategis yang diambil Pemerintah untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga beras di pasar tradisional, serta retail modern di seluruh Indonesia.


“Ini untuk mengatasi tantangan pasokan dan harga pangan di tengah fluktuasi harga komoditas global. Serta perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pangan nasional,” ujar Arief melalui siaran pers, Kamis (6/6/2024).

Karenanya, perpanjangan relaksasi HET beras ini diberlakukan pada Minggu (2/6) sampai regulasi baru terkait HET terbit. Ia berharap, kebijakan ini dapat memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha dan petani.

“Sekaligus memberikan jaminan kepada konsumen untuk mendapatkan beras dengan harga terjangkau “ tutupnya. ■ IMA

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK KEMANTAN

Title	Hewan Kurban Di Jakarta Sehat & Layak Konsumsi	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	11	
Author	DRIS	

Hasil Pemeriksaan 100 Petugas Dinas KPKP Hewan Kurban Di Jakarta Sehat & Layak Konsumsi

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta telah melakukan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah tempat di Ibu Kota. Hasilnya melegakan, yakni seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi.

DINAS KPKP DKI sudah menyebarkan 100 petugas pemeriksaan kesehatan ke berbagai tempat penampungan hewan kurban di Jakarta sejak 1 Mei 2024.

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan, per 31 Mei 2024, petugas tersebut telah mendatangi 117 lokasi tempat penampungan hewan kurban, dengan total hewan yang diperiksa kesehatannya sebanyak 10.253 ekor, yang terdiri dari sapi, kerbau, kambing dan domba.

"Secara keseluruhan hewan kurban pada kondisi sehat dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban," kata Eli, sapaan Suharini Eliawati, Senin (3/6/2024).

Eli mengungkapkan, mayoritas hewan kurban yang masuk Jakarta berasal dari Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim) dan Lampung.

Menurutnya, ada beberapa ekor hewan kurban dari luar daerah yang mengalami stres. Hal itu terjadi biasanya karena per-

jalanan panjang dengan kondisi cuaca panas. Hewan itu sudah diberikan obat-obatan dan vitamin.

"Ada enam ekor yang kami temukan dengan keluhan sakit mata, diare dan susah untuk berdiri. Namun, tidak ditemukan kasus hewan kurban yang terjangkit antraks hingga saat ini," ujarnya.

Dia memprediksi tempat penampungan dan jumlah hewan kurban di Jakarta akan terus bertambah. Pasalnya, dalam dua tahun terakhir Jakarta membutuhkan kurang lebih 61.000 hewan kurban, utamanya sapi dan kambing.

Dinas KPKP DKI Jakarta juga telah melakukan koordinasi secara internal maupun eksternal dalam menyediakan hewan kurban.

Koordinasi eksternal, papar Eli, dilakukan dengan daerah pemasok hewan kurban melalui Pejabat Otoritas Veteriner (POV). Seperti bekerja sama dengan Balai Veteriner Subang untuk pengujian sampel darah. Dari pengujian akan terlihat, apakah hewan kurban sakit atau sehat.



Suharini Eliawati

Sedangkan koordinasi internal, salah satunya dilakukan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI Jakarta.

"Mereka yang menerbitkan izin pemasukan hewan ke Jakarta," tandasnya.

Edukasi Sembelih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli meminta, Dinas KPKP mulai mengedukasi panitia dan juru sembelih hewan kurban, mengingat momentum Idul Adha semakin dekat.

"Juru sembelih memerlukan edukasi tentang pengetahuan

pemotongan hewan kurban yang memenuhi standar kesehatan. Sehingga, daging yang dihasilkan menjadi Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)," kata Taufik dalam keterangannya dikutip Rabu (5/6/2024).

Selain edukasi cara pemotongan, Dinas KPKP juga harus memberitahu penanganan limbah sisa pemotongan hewan kurban, seperti darah, kotoran ataupun kulit agar diolah sesuai peraturan. Sehingga, limbah tidak mencemari lingkungan.

"Setelah selesai kegiatan pemotongan dan pembagian daging kurban, untuk sisa-sisanya, itu harus dibersihkan. Supaya tidak menyisakan bau, kotor atau limbah yang mengganggu aktivitas masyarakat," sara Taufik.

Taufik menganjurkan pembagian daging hewan kurban menggunakan kemasan ramah lingkungan. Hal tersebut sebagai salah satu langkah kontribusi dalam mengurangi limbah plastik yang sulit terurai.

"Jangan pakai kantong plastik hitam saat pendistribusian," sarannya.

Selain membutuhkan ratusan tahun untuk terurai secara alamiah, lanjutnya, kantong plastik hitam juga mengandung zat

karsinogen pemicu kanker. Diungkap dia, pihaknya sudah menyarankan agar kemasan daging kurban pakai besek atau dari bahan yang ramah lingkungan.


"Jadi intinya diatur supaya tidak menimbulkan masalah lanjutan bagi lingkungan dan kesehatan," tegasnya.

Dia juga mengimbau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Dharma Jaya memfasilitasi masyarakat yang ingin berkurban di Rumah Potong Hewan (RPH). Meski begitu, ditegaskan Taufik, saran ini bukan untuk mewajibkan pemotongan hewan kurban di RPH.

Dari info yang dihimpun, Perumda Dharma Jaya melayani dan menyediakan jasa pemotongan hewan kurban dengan harga mulai dari Rp 850 ribu hingga Rp 2 juta.

Rinciannya, jasa potong hanya sampai karkas empat (*four quarter*) seharga Rp 850 ribu. Untuk jasa potong sampai cincang dan pemaketan daging sapi Rp 1.750.000 per ekor.

Sedangkan jasa potong sampai cincang dan pemaketan daging sapi yang tidak beli di Perumda Dharma Jaya, akan dikenakan tarif Rp 2 juta per ekor. Harga tersebut di luar biaya distribusi. ■ DRIS


Title	Kalsel Ekspor Bungkil Kelapa Sawit Ke Vietnam	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	10	
Author	Rakyat Merdeka	

Kalsel Ekspor Bungkil Kelapa Sawit Ke Vietnam

KALIMANTAN Selatan (Kalsel) mengekspor *Palm Kernel Expeller* (PKE) atau bungkil kelapa sawit sebanyak 2.300 ton ke Vietnam.

Sebelum dikirim, komoditas senilai Rp 4,8 miliar itu, juga akan diberi perlakuan berupa fumigasi sebagai salah satu persyaratan dari negara tujuan.

Bungkil kelapa sawit merupakan produk akhir atau limbah dari proses pengolahan inti sawit menjadi minyak sawit. Komoditas ini kerap dimanfaatkan menjadi bahan baku pakan ternak, sehingga banyak diminati oleh negara lain.

Title	PEMERIKSAAN HEWAN KURBAN	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	6	
Author	Rakyat Merdeka	



PEMERIKSAAN HEWAN KURBAN: Petugas memeriksa ternak sapi dan kambing di peternakan Putra Bungsu Neroktog, Kota Tangerang, Banten (6/6/2024). Pemeriksaan kesehatan hewan secara acak dilakukan untuk memastikan ternak sapi maupun kambing yang diperjualbelikan untuk hewan kurban pada Idul Adha nanti dalam kondisi sehat, layak disembelih dan tidak memiliki penyakit bawaan yang bisa menular pada manusia.

Title	Warga Sulit Cari Keadilan	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	8	
Author	KAL	

Tanah Adat Papua Diserobot Pengusaha Warga Sulit Cari Keadilan

Anggota Komisi X DPR Robert J Kardinal menyesalkan masih sulitnya bagi masyarakat Papua mencari keadilan atas tanahnya. Walhasil, tak sedikit warga Papua terpaksa harus ke Jakarta hanya untuk menjemput keadilan.

ROBERT mengatakan, masyarakat adat di Boven Digoel dan Kabupaten Sorong bersusah payah sampai ke Jakarta hanya untuk mencari keadilan.

"Berapa ribu kilometer yang harus mereka tempuh untuk menjemput keadilan," kata dia menyikapi aksi demonstrasi puluhan masyarakat adat Papua, suku Awyu di Boven Digoel dan suku Moi di gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, pekan lalu.

Lewat aksi damai di depan kantor para wakil Tuhan ini, mereka berharap MA menjatuhkan putusan hukum yang dapat melindungi hutan adat mereka. Masyarakat adat ini tengah terlibat gugatan lantaran tanah adat mereka diserobot sejumlah perusahaan sawit asal Jakarta. Gugatan kedua suku ini kini telah sampai tahap kasasi di MA.

Khusus Suku Awyu, mereka menggugat kasasi tiga perusahaan sawit yang beroperasi di Boven Digoel, yakni PT Indo Asiana Lestari (IAL), terkait izin kelayakan lingkungan hidup seluas 36.094 hektare yang dikeluarkan Pemerintah. Kemudian PT Kartika Cipta Pratama dan PT Megakarya Jaya Raya.

Sementara Suku Moi, mengajukan gugatan kepada PT Sorong Agro Sawitindo (SAS) atas 18.160 hektare hutan adat untuk perkebunan sawit. PT SAS sebelumnya memegang konsesi seluas 40 ribu hektare di Sorong.

Namun pada 2022, Pemerintah Pusat mencabut izin pelepasan kawasan hutan PT SAS, disusul dengan pencabutan izin usaha. Masalah hutan adat tersebut kini masuk di PTUN Jakarta.

Robert menilai, banyak sengketa hukum antara masyarakat adat di Papua dan pelaku usaha di perkebunan lantaran sama sekali tidak melibatkan masyarakat adat. Padahal, seluruh tanah di Papua itu, ada pemiliknya, masyarakat adat di sana. Hak masyarakat adat Papua tidak hanya dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, tapi juga oleh hukum internasional.

"Bagaimana seorang dari Jakarta, mungkin pemiliknya nggak pernah tinggal di Jakarta, mungkin di Singapura, Hong Kong, bisa mengklaim ribuan hektare tanah adat masyarakat yang hidupnya sengsara di pinggir hutan itu," tegasnya.



Robert J Kardinal

Untuk itu, dia mendesak Pemerintah mengambil sikap atas sengketa lahan antara masyarakat adat Papua dengan pelaku usaha perkebunan. Apalagi masyarakat adat di Papua, sama sekali tidak mengetahui jika hutan adat mereka akan dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan sawit.

"Jadi jangan hanya melihat substansi hukumnya, tapi juga lihat sosial dan politiknya dan bagaimana penghargaan kepada masyarakat adat di Papua yang ada. Mereka turun-temurun tinggal di situ, namun tiba-tiba hutan mereka puluhan ribu hektare dibongkar begitu saja tanpa hak yang jelas," wantinya.

Untuk itu, politisi Golkar daerah pemilihan Papua Barat Daya ini berharap, sengketa lahan di Papua ini jadi pelajaran untuk ke depan agar Pemerintah hendaknya bertindak sebagai

fasilitator. Pemerintah bisa bertindak Pejabat Catatan Sipil yang berdiri di tengah-tengah antara investor dan masyarakat adat.

"Biarlah pemilik tanah dan investor ini berunding sendiri. Pemerintah cukup mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Bila perlu menjaga supaya kepentingan-kepentingan masyarakat adat ini bisa terpenuhi," ucapnya.

Jangan juga, lanjutnya, investor cuma datang ke Pemerintah, terus tidak melihat ke bawah, tiba-tiba izinya keluar. "Amdalnya keluar. Padahal Amdal itu kan juga harus melibatkan masyarakat yang ada di situ," bilanginya.

Robert menilai, Pemerintah sebaiknya mengubah cara pandang terhadap pengelolaan sumber daya alam di Papua. Tidak sekadar melayani pengusaha, tapi juga membela kepentingan masyarakat adat.

Untuk itu, dia mendesak negara untuk ikut agar semua izin hak guna usaha yang ada tanpa melibatkan masyarakat adat itu dibatalkan seluruhnya.

"Oke-lah kalau pelaku usaha mau kerja di Papua. Tapi Papua ini kan ada yang punya tanah, ya duduk bersama, bicarakan. Apakah penyertaan modal tanahnya itu dengan investor, bagi hasil atau bagaimana, tapi diselesaikan oleh mereka berdua (pelaku usaha dan masyarakat adat). Pemerintah cukup mengesahkan aturan, izinya

saja," pesannya.

Sementara, anggota DPRD Provinsi Papua John NR Gobai mengatakan, di beberapa daerah di Papua memang terdapat ribuan hektare sawit yang ditanam oleh perusahaan-perusahaan yang diberikan izin.


Sayangnya, keberadaan perusahaan sawit ini malah memicu konflik dengan masyarakat setempat. "Ada yang mendukung, ada juga yang meminta perusahaan ditutup," katanya.

Menurutnya, pemicu konflik perusahaan sawit dan masyarakat lantaran penerimaan resmi dari sawit yang selama ini disetor ke pemerintah pusat. Sementara, pemerintah daerah mendapat sedikit, tidak sebanding dengan jumlah sawit dan minyak sawit yang keluar dari pohon sawit ditanam di tanah Papua.

"Mungkin kecil karena masuk ke kantong pribadi oknum pejabat," ujarnya.

Untuk meredam konflik di Papua ini, menurutnya, Pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan izin untuk penambahan kebun kebun sawit. Sebab nyatanya, kehadiran sawit telah merusak sumber kehidupan masyarakat.

Sawit juga telah merusak sumber hidup, sumber tanaman obat dari masyarakat. Yang lebih parah, kehadiran sawit malah membuat banyak daerah pinggiran banjir. ■ KAL

Title	Hilirisasi Sawit Harus Menuju Produk Bernilai Jual Tinggi	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	10	
Author	TI	

Hilirisasi Sawit Harus Menuju Produk Bernilai Jual Tinggi

JAKARTA, ID – Hilirisasi sawit di Tanah Air harus diarahkan pada pengembangan komoditas bernilai tambah tinggi berupa produk untuk keperluan khusus (*specialities*), seperti kosmetik, detergen, dan farmasi, yang harganya di pasar internasional US\$ 3.000-4.000 per ton. Syaratnya, Indonesia perlu melakukan riset, inovasi, dan penerapan teknologi pengolahan berbasis *dry-process*. Apabila itu terwujud, kontribusi bisnis sawit bagi perekonomian nasional bisa mencapai US\$ 107,02 miliar pada 2028, meningkat 70,14% dari 2023 yang masih US\$ 62,9 miliar.

Dalam catatan dan proyeksi Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), pada 2023, kontribusi sawit ke perekonomian RI US\$ 62,9 miliar, bersumber dari nilai penggunaan domestik US\$ 21,4 miliar, ekspor US\$ 38,4 miliar, dan biomassa US\$


3,1 miliar. Tahun lalu, volume ekspor hanya 33,3 juta ton dengan realisasi rata-rata harga minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) US\$ 1.152 per ton. Pada 2028, kontribusi sawit ke perekonomian nasional diperkirakan US\$ 107,02 miliar, bersumber dari nilai penggunaan domestik US\$ 30,92 miliar, ekspor US\$ 55,81 miliar, dan pemanfaatan biomassa US\$ 20,29 miliar. Saat itu, volume ekspor diproyeksikan 42,60 juta ton, rerata harga CPO sebesar US\$ 1.310 per ton, dan banderol biomassa naik pesat menjadi US\$ 126 per ton di 2028 dari US\$ 21,7 per ton pada 2023.

Menurut Ketua Umum DMSI Sahat Sinaga, hilirisasi sawit di Indonesia sudah berjalan sangat baik, yang di antaranya ditandai dengan terus berkembangnya jenis produk turunan yang dihasilkan. Sebelumnya disebutkan, produk turunan sawit yang

dihasilkan Indonesia 54 jenis pada 2007 dan menjadi 179 di 2023. Namun demikian, hilirisasi sawit nasional harus diarahkan ke komoditas bernilai tambah tinggi (*high value added*) yang harganya jauh lebih mahal. Salah satu tujuannya agar hilirisasi juga bisa mengangkat harga tandan buah segar (TBS) sawit petani, setidaknya sampai Rp 6.000 per kilogram (kg) dari rata-rata saat ini Rp 2.000 per kg. "Kita harus bisa hasilkan produk turunan yang harganya sampai US\$ 3.000-4.000 per ton, seperti kosmetik, detergen, cat, farmasi, dan *propylene*. Atau, setidaknya produk *derivatives* di antaranya *biolubricant* yang harganya US\$ 2.000-3.000 per ton," ungkap Sahat.

Sahat, yang juga Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), menyatakan, tidak mudah mewujudkan hal

itu. Selain harus melakukan riset, inovasi, dan penerapan teknologi pengolahan berbasis *dry-process* yang kini masih dikuasai negara-negara barat, Indonesia harus menaklukkan tantangan di dalam negeri sendiri, di antaranya produktivitas tanaman sawit. "Karena itu, semua harus kerja sama erat, pemerintah perlu melibatkan asosiasi, UMKM, para petani sawit, dan lainnya. Tapi yang pasti samakan dulu konsep hilirisasi sawit kita. Jangan POME (*palm oil mill effluent/limbah cair sawit*) diekspor, pungutannya hanya US\$ 5 per ton, hilirisasi *kok* produk hulu diekspor. Biomassa (*waste*) sawit juga harus dimanfaatkan. Kalau ini terjadi, harga TBS di petani bukan lagi Rp 2.000 per kg tapi Rp 6.000 per kg," papar dia. Upaya itu sekaligus mampu menyelesaikan kemiskinan di tingkat petani sawit. **(tl)**

Title	Pekerjaan Rumah RI untuk Hilirisasi Sawit	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Kompas	
Page	10	
Author	HEN	

Pekerjaan Rumah RI untuk Hilirisasi Sawit

Kendati belum optimal, hilirisasi sawit itu sudah berhasil baik. Dalam 12 tahun terakhir, komposisi ekspor sawit RI berubah dari didominasi sawit mentah menjadi produk olahan sawit.

JAKARTA, KOMPAS— Hilirisasi sawit nasional sudah berjalan baik dalam 12 tahun terakhir ini. Namun, masih ada lima pekerjaan rumah bagi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, untuk lebih meningkatkan hilirisasi itu.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Siyapung, Kamis (6/6/2024), mengatakan, selama ini, Indonesia menempuh tiga jalur hilirisasi sawit. Pertama, mengolah minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) dan minyak inti sawit (*palm kernel oil/PKO*) menjadi produk pangan dan mikronutrisi.

Kedua, mengolah CPO menjadi produk oleokimia, antara lain sabun, deterjen, kosmetik, dan bioplastik. Ketiga, mengolah CPO menjadi produk energi, seperti biodiesel, bensin, dan avtur sawit.

"Kendati belum optimal, hilirisasi sawit itu sudah berhasil baik. Dalam 12 tahun terakhir, komposisi ekspor sawit RI berubah dari didominasi sawit mentah menjadi produk olahan sawit," ujarnya dalam Special Dialogue "Strategi Meningkatkan Daya Saing Kelapa Sawit Indonesia melalui Hilirisasi" yang digelar CNBC Indonesia.

PASPI mencatat, pada 2011, ekspor CPO dan PKO masih mendominasi, yakni 52 persen. Untuk produk olahan sawit, se-

perti *refined palm oil* (RPO) dan *refined palm kernel oil* (RPKO), komposisi ekspornya 41 persen, serta produk jadi berupa oleokimia dan biodiesel 17 persen.

Pada 2023, komposisi ekspor itu berubah. Ekspor RPO dan RPKO mendominasi, yakni 75 persen. Adapun untuk ekspor CPO dan PKO, serta oleokimia dan biodiesel masing-masing 11 persen dan 14 persen.

Tungkot juga menuturkan, hilirisasi sawit di sektor energi, terutama biodiesel, mampu mengurangi konsumsi solar impor di dalam negeri dari 41 persen pada 2011 menjadi 18 persen pada 2023. Penghematan devisa impor solar juga meningkat dari 0,5 miliar dollar AS pada 2015 menjadi 11,2 miliar dollar AS pada 2023.

"Ini artinya, substitusi impor solar ke biodiesel berjalan baik sehingga dapat menopang kinerja neraca perdagangan," tuturnya.

Menurut Tungkot, hilirisasi sawit itu perlu terus ditingkatkan pada era pemerintahan Prabowo-Gibran. Setidaknya ada lima pekerjaan rumah yang masih perlu dilakukan di sektor tersebut.

Pertama, melanjutkan *mandatory* (kewajiban) biodiesel B35 dan B40. Kedua, memulai *mandatory* bensin sawit atau bensin diperolehan. *Mandatory* bensin diperlukan untuk menyubstitusi impor bensin yang sebenarnya lebih besar ketimbang impor solar.

"Pemerintah sudah mulai

mengembangkan dan mengujinya. Langkah ini diharapkan bisa terus berlanjut pada era Prabowo-Gibran," katanya.

Ketiga, lanjut Tungkot, mempercepat *mandatory* bioavtur berbasis sawit dan minyak jelantah. Keempat, pengembangan CPO *nonfood grade* untuk bahan bakar nabati.

"Terakhir, meningkatkan produktivitas tanaman sawit, terutama milik rakyat. Hal itu dapat dilakukan dengan pemajaan tanaman sawit dan pengelolaan perkebunan sawit secara berkelanjutan," ujarnya.

Produk bernilai tinggi

Dalam forum yang sama, Ketua Umum Dewan Sawit Minyak Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengemukakan, sudah saatnya Indonesia mulai mengembangkan produk turunan sawit rendah karbon, bergizi tinggi, dan bernilai tambah tinggi. Produk itu adalah *degummed palm mesocarp oil* (DPMO) atau hasil olahan *palm mesocarp oil* (PMO).

Produk tersebut dihasilkan dari penerapan teknologi proses kering, bukan lagi proses basah. Dengan teknologi itu, emisi karbon selama pemrosesan dapat diturunkan 79 persen.

"Kemudian dalam pengembangan PMO menjadi DPMO, diterapkan teknologi reesterifikasi yang bisa menurunkan asam lemak bebas (*free fatty acid/FFA*) minyak sawit, *degummed palm mesocarp oil*,"

katanya.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen melanjutkan program *mandatory* B35 dan kemudian akan dilanjutkan ke B40. Kementerian tersebut juga terus mengembangkan dan menguji bensin agar dapat dikembangkan badan usaha milik daerah (BUMD) atau badan usaha milik desa (BUMDes).


Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, program *mandatory* B35 masih terus berlanjut hingga nanti digantikan B40. Saat ini, uji coba B40 tengah berlangsung dan belum ditetapkan *mandatory*-nya.

"Uji coba B40 di sektor otomotif telah selesai. Kemudian akan dilanjutkan ke sektor non-otomotif, seperti alat berat, kereta api, pembangkit listrik, angkutan laut, dan sejumlah alat pertanian. Targetnya, *mandatory* B40 bisa diterapkan tahun depan," katanya.

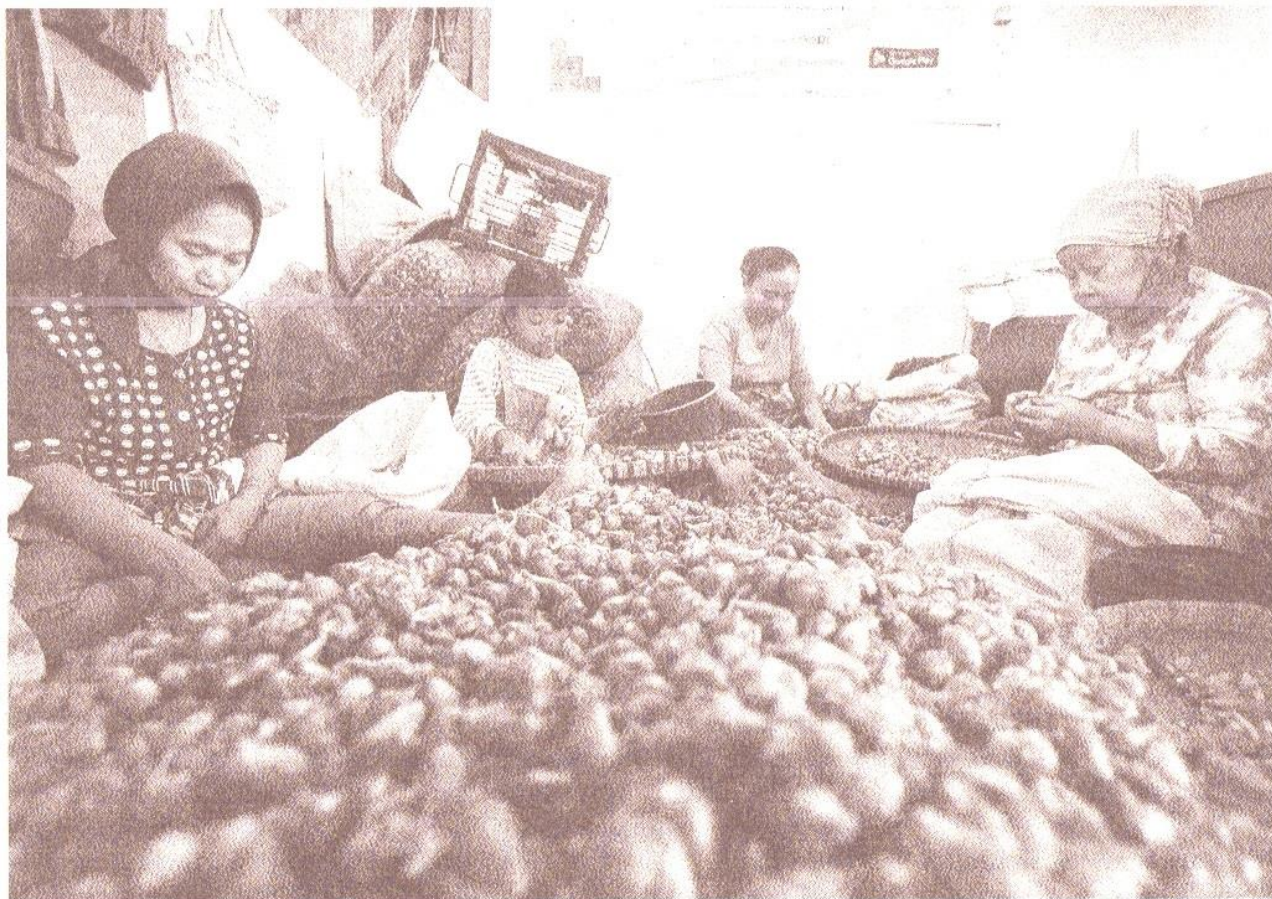
Selain itu, lanjut Eniya, Kementerian ESDM juga masih mengembangkan dan meriset penggunaan bensin untuk campuran bensin. Setelah itu, uji coba pemakaiannya untuk keperluan harian masyarakat akan diakselerasi. Jika hasilnya baik, pemerintah akan mendorong agar pengelolaan bensin dapat dilakukan BUMD atau BUMDes, bukan perusahaan besar. (HEN)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**


Title	Pengupas Bawang di Pasar Induk Kramat Jati	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Kompas	
Page	10	
Author	Kompas/Fakhri Fadlirrohman	

Pengupas Bawang di Pasar Induk Kramat Jati



KOMPAS/FAKHRI FADLIRROHMAN

Aktivitas para pengupas bawang merah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Senin (3/6/2024). Para pengupas bawang di Pasar Induk Kramat Jati dibayar Rp 3.000 per kilogram dan Rp 1.000 per kilogram untuk memotong bawang merah. Adapun upah mengupas bawang putih sebesar Rp 15.000 per satu karung yang bisa berisi lebih dari 15 kilogram bawang.

Title	Pemerintah Amankan Stok Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	6	
Author	M Taufan SP Bustan	

Pemerintah Amankan Stok Pangan

Selain memastikan ketersediaan stok, Bulog juga menjamin harga beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan masih mengacu pada harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

M TAUFAN SP BUSTAN
m.taufan@mediaindonesia.com

PEMERINTAH memastikan stok pangan terutama beras dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Idul Adha. Kemarin, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi pun meninjau langsung stok beras, proses penyimpanan, dan mekanisme distribusi beras di Kompleks Pergudangan Bulog Koto Malintang, Kabupaten Agam, Sumatra Barat.

"Menjaga ketersediaan beras di seluruh Indonesia adalah prioritas utama kami, terutama dalam menghadapi potensi gejolak harga dan peningkatan permintaan di

masa mendatang, maupunantisipasi dan penanganan terhadap terjadinya bencana banjir seperti yang baru-baru ini menimpa wilayah Sumbar khususnya di Kabupaten Agam," ujar Arief.

Di tempat yang sama, Pimpinan Wilayah Bulog Sumatra Barat Sri Muniati mengatakan sebanyak 550 ton beras stok Bulog di gudang tersebut tersedia untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan pangan di wilayah Agam. Selain itu, terdapat stok dalam perjalanan dari Kota Padang sebagai *move regional* sebanyak 1.100 ton.

Adapun penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Agam sejak Januari hingga saat ini mencapai 11.276

ton atau 54% target di 2024. Untuk penyaluran bantuan pangan beras sejak Januari dan saat ini sampai 4 Juni 2024 sebanyak 17.570,720 ton untuk 393.913 keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan. Saat ini akan disalurkan 5.964,06 ton bantuan pangan beras.

Sri mengungkapkan serapan beras dalam negeri Kanwil Sumbar mencapai 1.750 ton atau 77% dari target di 2024 sebanyak 2.250 ton.

Sementara itu, Pimpinan Kanwil Perum Bulog Sulawesi Tengah Heriswan mengatakan stok beras yang tersedia di Bulog saat ini mencapai 24 ribu ton. "Dengan stok yang ada di gudang, kami bisa memastikan untuk kebutuhan beras aman dan terpenuhi," terangnya.

Menurut Heriswan, selain memastikan ketersediaan stok, Bulog juga menjamin harga beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Harga beras meroket

Di Jawa Barat, kegagalan panen yang disebabkan serangan hama wereng dan burung pipit menyebabkan turunnya produksi pertanian di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, dan Garut. Dampaknya, harga beras meroket di wilayah tersebut.

"Kenaikan harga beras yang terjadi sekarang sangat berat bagi masyarakat. Untuk beras medium di pasaran dijual Rp13.000 per kilogram dan beras premium dari Rp13.500 menjadi Rp14.000-Rp15.000 per kilogram. Akan tetapi, di setiap minimarket rata-rata harga beras dijual Rp89.000, Rp95.000, dan Rp98.000 per 5 kilogram," ujar Imas, 38, warga yang hendak membeli beras.

Masih di Jawa Barat, untuk mempercepat pengolahan tanah persawahan di Kabupaten Purwakarta, dinas pertanian setempat menyerahkan 33 traktor bantuan dari Kementerian Pertanian kepada para petani. Dengan bantuan tersebut diharapkan produksi padi pada Oktober 2024 akan


meningkat dari tahun sebelumnya.

Tahun ini Dinas Pertanian Purwakarta menargetkan produksi mencapai 3.670 ton padi. "Sasaran kita target tahun ini 3.600 ton sehingga dengan target dari percepatan tadi, insya Allah minimal sasaran kita sama dengan di 2023 pada 2024 ini," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purwakarta Sri Jaya Midan.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan, menjelang Hari Raya Idul Adha harga pangan dalam kondisi normal. "Saya ke pasar tadi barang cukup, stok cukup, harga aman," kata Zulkifli usai meninjau Pasar Kranggan, Cilegon, Banten, kemarin.

Namun, di sisi lain, Zulkifli menemukan harga daging ayam dan telur yang terlalu murah di pasar tersebut. Untuk harga beras masih stabil. "Telur terlalu murah Rp27.000/kg, ayam terlalu murah Rp38.000/kg, terus beras stabil," imbuhnya.

Di Bengkulu, Pemkab Rejang Lebong telah menyalurkan bantuan bibit padi unggul sebanyak 37,2 ton untuk 1.489 hektare sawah yang tersebar di wilayah tersebut. Pemberian bantuan bibit padi unggul itu diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian demi mengantisipasi dampak El Nino pada tahun ini. (Fal/AD/RZ/MY/LN/SG/BB/J-3)

Title	Surplus Ketersediaan Hewan Kurban	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Koran Kontan	
Page	14	
Author	Aurelia Lucretie	

Surplus Ketersediaan Hewan Kurban


JAKARTA. Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan ketersediaan hewan kurban mencukupi untuk kebutuhan Idul Adha 2024. "Persiapan kurban *insya Allah* aman, cukup sampai kita Idul Adha nanti, saya sudah terima laporannya, dan aman, jumlahnya sangat cukup," kata dia dalam keterangan resminya, Kamis (6/6).

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan mencatat, kebutuhan hewan kurban nasional mencapai 1,97 juta ekor, dengan ketersediaan mencapai 2,06 juta ekor. Artinya, surplus hingga 88.000 ekor.

Berdasarkan data tersebut, Amran yakin jumlah ketersediaan hewan kurban baik sapi, kerbau, kambing dan domba sangat mencukupi bahkan surplus untuk tahun ini. Kini, Kementan secara aktif mengawasi pasokan hewan kurban di seluruh daerah, termasuk memastikan kesehatannya.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Nasrullah menambahkan, pihaknya telah melaksanakan berbagai langkah guna memastikan kelancaran pelaksanaan kurban tahun ini. "Kami memastikan sertifikat kesehatan ternak sudah lengkap, memeriksa *ear tag* untuk menjamin ternak telah teregister," imbuh dia.

Aurelia Lucretie

Title	Harga Komoditas Pangan Stabil	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Tangsel Pos	
Page	8	
Author	Yul	

Kunjungan Menteri Perdagangan Ke Cilegon

Harga Komoditas Pangan Stabil

CILEGON-Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia Zulkifli Hasan, meninjau sejumlah harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Kelapa Blok F, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Kamis (6/6).

Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, untuk sejumlah harga bahan komoditi di Pasar Kelapa Blok F Kota Cilegon cukup stabil dan ketersediaan yang cukup. Mulai dari harga telur Rp 27 ribu/kg dan daging ayam ras Rp 38/kg.

"Ini cukup murah, dan untuk harga bawang juga standar. Bawang merah dan putih Rp 40 ribu serta cabai Rp 40 ribu," ujarnya.

Sedangkan untuk komoditi beras, kata Zulhas, harga beras masih cukup stabil. Tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. "Cukup stabil, beras sama dan itu tidak ada kenaikan," terangnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menjelaskan, Mendag langsung melakukan pengecekan terhadap sejumlah komoditi pokok yang berpengaruh terhadap inflasi daerah. Mulai dari harga cabai, bawang

merah, bawang putih, daging ayam ras, telur, beras dan komoditi lainnya.

"Pagi ini kita menerima kunjungan kerja Mendag RI Zulkifli Hasan. Beliau memulai kunjungan di pasar yang ada di Kota Cilegon dan beliau mengecek satu persatu harga yang utamanya komoditas pokok," ungkap Al Muktabar.

"Tadi saya juga menyampaikan untuk komoditi telur, kita terus melakukan komunikasi dengan pengusaha telur dan terlihat daya beli masyarakat juga cukup meningkat," tambahnya.

Selain itu, Al Muktabar juga menuturkan kunjungan Mendag RI Zulkifli Hasan ke salah satu pasar di Kota Cilegon juga sebagai salah satu upaya dalam memastikan ketersediaan dan harga sejumlah komoditi pangan menjelang Hari Raya Idul Adha 2024.

"Kunjungan beliau ini juga karena kita dalam waktu dekat akan menyongsong Idul Adha, dan di pasar tadi memperlihatkan situasi bahan pokok terkendali dan stok cukup banyak," imbuhnya.

Sebagai informasi, setelah meninjau sejumlah harga dan




TINJAU HARGA. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, meninjau sejumlah harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Kelapa Blok F, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Kamis (6/6).

ketersediaan komoditi pangan di Pasar Kelapa Blok F Al Muktabar bersama Zulkifli Hasan melaku-

kan kunjungan ke PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Turut hadir pada kesempatan

tersebut, Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto, Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten Dede

Rohana, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta, serta tamu undangan yang lainnya. (yul)

Title	Mentan Jamin Stabilitas Pasokan Harga Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Kabar Banten	
Page	9	
Author	Ant/H-45	

Mentan Jamin Stabilitas Pasokan Harga Pangan

TANGERANG, (KN).-

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 1445 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada hari Senin tanggal 17-18 Juni 2024.

"Pangan aman, sekarang beras sudah stabil bahkan ada di bawah harga pokok penjualan (HPP)," kata Mentan Amran di Tangerang, Kamis (6/6/2024).

Menurut dia, kondisi ketersediaan pangan secara nasional dapat dipastikan aman dan terjamin. Dimana, hal tersebut terlihat dari pasokan dan harga pangan yang ada seperti beras, jagung serta yang lainnya dalam keadaan stabil.

"Kemudian jagung yang lima bulan lalu kita impor tapi tiga hari yang lalu justru kita ekspor. Jadi itu artinya pemerintah sudah bekerja maksimal," ujarnya.

Kementan juga saat ini

”Pangan aman, sekarang beras sudah stabil bahkan ada di bawah harga pokok penjualan (HPP).


Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian

sedang berupaya memfasilitasi dan menjaga ketersediaan pangan dari wilayah surplus. Hal itu dilakukan untuk menjaga agar hasil panen petani tetap terserap pasar di tengah situasi konstitusional seperti ini. Dalam hal ini, Mentan juga menyampaikan mengenai ketersediaan hewan kurban sebagai kebutuhan masyarakat pada Iduladha. Dimana, terdapat 2,06 juta ekor dengan terdiri atas sapi, kerbau, kambing, dan domba di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nantinya.
(Ant/H-45) ***



ANTARA

MENTERI Pertanian Andi Amran Sulaiman.*

Title	Pengembangan Karier dan Usaha Bidang Pertanian	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Fajar Makassar	
Page	2	
Author	Syamsul Rahman	

Pengembangan Karier dan Usaha Bidang Pertanian



— OLEH —
SYAMSUL RAHMAN
Dosen Fakultas
Pertanian
Universitas Islam
Makassar (UIM)
Al-Gazali

Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Sensus Pertanian 2023 menyatakan bahwa kondisi petani di Indonesia rata-rata sudah berusia lanjut, yaitu berusia di atas 55 tahun dan kecenderungannya mengalami kenaikan, sedangkan petani yang berusia 44 tahun ke bawah proporsinya mengalami penurunan.

Hasil sensus tersebut merilis data bahwa jumlah petani generasi X atau perkiraan usia 43 – 58 tahun saat ini mencapai 42,39 persen, kemudian jumlah petani milenial yang berumur 19 – 39 tahun sebanyak 6.183.009 orang, atau sekitar 21,93 persen dari petani di Indonesia, atau petani milenial dengan perkiraan usia 27 – 42 tahun mencapai 25,61 persen, sedangkan petani *baby boomer* atau perkiraan usia 59 – 77 tahun mencapai 27,61 persen. Data ini menunjukkan bahwa ternyata petani kita masih dipenuhi atau mayoritas umurnya relatif sudah agak sepuh, sehingga harus menjadi perhatian kita bersama untuk dapat mendorong terjadinya regenerasi petani dan tenaga kerja di sektor pertanian.

Peran Petani Milenial

Hadimya petani milenial memberikan salah satu alternatif dalam mempercepat regenerasi petani. Petani milenial dianggap mampu menjembatani antara petani muda dengan petani yang sudah berusia lanjut. Kehadiran petani milenial yang dapat merepresentasikan petani masa kini dengan berjiwa muda, akses pasar

relatif baik dan wirausahawan berhasil menjadi salah satu daya tarik agar generasi milenial ini mau berdaya saing dan berdaya sanding pada bidang pertanian. Hal ini menegaskan bahwa penyuluhan dari petani ke petani dengan figur petani milenial berhasil dapat menjadi katalisator yang baik dalam menarik generasi muda berminat bekerja di sektor pertanian.

Persepsi masyarakat pada umumnya, menjadi pelaku pertanian atau pelaku agribisnis bukanlah pilihan utama, termasuk pemuda pedesaan. Boleh jadi keterlibatan pemuda

dalam bertani dan atau beragribisnis lebih merupakan keterpaksaan. Namun faktanya tidak semua seperti itu dan yang seperti itu pun dalam proses perjalanannya banyak yang berkembang melebihi pilihan utamanya. Terlepas dari semua itu, bahwasanya keputusan para pelaku muda untuk menentukan pilihan bertani atau beragribisnis sejatinya melalui proses atau tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, petani milenial dianggap sebagai individu yang telah melewati tahapan-tahapan tersebut sehingga seharusnya telah memiliki pendirian yang stabil untuk berkecimpung, berkariyer dan berusaha di bidang pertanian.


Strategi Pengembangan

Strategi yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan dan menciptakan petani milenial yaitu melalui pendidikan, khususnya pendidikan di bidang pertanian. Menurut Haryanto *et. al* (2022) bahwa pendidikan berhubungan dengan kemandirian individu. Selain itu, pendidikan memiliki pengaruh pada kemampuan seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan, sehingga dapat diartikan pendidikan merupakan suatu hal yang memiliki keterkaitan seseorang dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan kapasitasnya. Terkait dengan hal tersebut ada beberapa pendekatan yang telah dilakukan perguruan tinggi dalam upaya pengem-

bangun kewirausahaan dan menciptakan kesempatan mahasiswa melalui penumbuhan wirausaha di bidang pertanian. *Pertama*, melalui *green house* dan kebun percontohan yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Keberadaan *greenhouse* dan kebun percontohan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk belajar pertanian mulai dari subsistem hulu sampai hilir.

Kedua, program pemagangan. Baik pemagangan secara mandiri dilakukan oleh setiap perguruan tinggi, maupun pemagangan melalui program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) yaitu magang dan studi independent bersertifikat (MSIB). Terutama pemagangan mahasiswa pada instansi dan DUDI yang berbasis pertanian. *Ketiga*, program kreativitas mahasiswa (PKM). Program ini bantuan pendanaan dari Kemdikbudristek yang diperuntukan bagi mahasiswa yang memiliki inovasi dan kreativitas di bidang wirausaha (*entrepreneurship*). *Keempat*, kegiatan *field trip* atau praktek kerja lapangan (PKL). Kegiatan kunjungan ke daerah/wilayah atau sentra produksi pertanian, untuk melihat lebih dekat bagaimana seluk-beluk kegiatan usahatani yang dilakukan oleh petani, sehingga mereka mampu untuk menganalisis prospek dan potensi pertanian yang perlu dikembangkan.

Keenam, pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh para dosen di perguruan tinggi. Hal ini berkaitan aturan Kemdikbudristek, bahwa setiap dosen yang mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan minimal 5 orang mahasiswa setiap kegiatan. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mengenalkan kepada mahasiswa terkait pengembangan inovasi dan teknologi, serta fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Demikianlah beberapa kegiatan diantara sekian kegiatan yang dilakukan pihak perguruan tinggi, yang diharapkan dapat mengambil peran untuk menciptakan mahasiswa menjadi petani milenial, atau lulusan yang siap berkariyer, bekerja dan berusaha di sektor pertanian. (*)

Title	Mentan: Peternakan Inti Plasma Tingkatkan Produksi Daging	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Surabaya Pagi	
Page	3	
Author	JK-06/Ham	

Mentan: Peternakan Inti Plasma Tingkatkan Produksi Daging

SURABAYA PAGI, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pola kemitraan inti-plasma dalam peternakan bisa diterapkan untuk meningkatkan produksi daging, yang nantinya berdampak terhadap kesejahteraan peternak di Indonesia.

"Kita sudah lihat peternakan sapi (milik PT Lembu Setia Abadi Jaya), itu 90 persen plasma dan 10 persen inti. Kambing juga demikian ke depan," kata Mentan Arman saat ditemui di Majalengka, Jawa Barat, Kamis (6/6).

Ia menjelaskan bahwa konsep kemitraan ini bisa melibatkan lebih banyak peternak lokal yang bekerja sama dengan pengusaha, dalam meningkatkan produksi daging dalam negeri.

Menurut dia, pola kemitraan inti-plasma sudah berhasil diterapkan pada kegiatan peternakan di Majalengka serta diharapkan semua daerah bisa mengaplikasikan konsep tersebut.

"Kalau ini kembangkan di seluruh Indonesia, kita bisa swasembada daging ke depan. Tapi kita memulai dulu. Kami mau mengundang (peternak dan pengusaha) khusus ke kantor untuk mengecek apa saja yang dibutuhkan dalam mengembangkan ini," ujarnya.

Arman menjamin dalam dua pekan ke depan, Kementerian Pertanian bakal mengajak pengusaha serta

peternak untuk membahas regulasi maupun kebijakan yang dibutuhkan guna mendukung program itu.

Mentan memastikan bahwa pemerintah selalu memprioritaskan pelayanan terbaik bagi peternak, termasuk mempermudah proses perizinan yang diajukan untuk kegiatan usaha di sektor peternakan.

"Apa saja kebijakan dari pemerintah untuk mengakselerasi program ini, kami minta diseriusin dan dibantu. Jangan dipersulit. Misalnya untuk breeding dan seterusnya kami dukung penuh. Intinya sudah ada arah untuk Indonesia mandiri daging," katanya.

Dukungan tersebut, kata dia, sangat diperlukan karena potensi pasar untuk kebutuhan daging dalam negeri sangat tinggi dan seharusnya peternak lokal dapat memberikan kontribusi lebih.

Mentan menambahkan untuk meningkatkan produksi daging diperlukan pendekatan secara holistik, yang mempersiapkan semua hal dari hulu hingga hilir.

Pendekatan semacam ini, tambah dia, misalnya para peternak wajib memperhatikan kesehatan hewan sampai ketersediaan pakan tercukupi. Sehingga daging yang dihasilkan berkualitas dan bergizi.

"Jadi pendekatannya holistik. Dari hulu ke hilir. Tidak bisa parsial," ucap Mentan. ■ **JK-06/ham**




SP/KEMANTAN

Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman saat meninjau kegiatan peternakan kambing di Majalengka, Jawa Barat. Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman saat meninjau kegiatan peternakan kambing di Majalengka, Jawa Barat.

BIRO

BLIK

Title	Mentan Cek Ketersediaan Hewan Kurban	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Kabar Banten	
Page	5	
Author	H-36	



DEWI AGUSTINI/**KB*

PJ Bupati Tangerang Andi Ony dampingi Mentan Andi Amran Sulaiman mengunjungi PT LSAJ di Desa Mekarsari, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Kamis (6/6/2024).*

Mentan Cek Ketersediaan Hewan Kurban

TANGERANG, (KB).- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau ketersediaan hewan kurban khususnya sapi jelang perayaan Hari Raya Iduladha 1445 Hijriah/2024 Masehi di Desa Mekarsari, Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang, Kamis (6/6/2024).

Dalam memastikan ketersediaan kebutuhan kurban tersebut, Amran langsung mengecek sejumlah pabrik pakan mini milik penggemuk sapi PT Lembu Setia Abadi Jaya (LSAJ) Farm Tangerang. Perusahaan peternakan hewan tersebut memiliki luas area 22,5 hektare, dengan diisi kandang sapi, pabrik pakan mini berkapasitas 40 ton per hari, dan rencana pabrik pupuk, RPH, pabrik bakso, sosis, nugget, meat shop,

serta cold storage.

Bangunan kandang sapi PT LSAJ memiliki kapasitas hingga 3.000 ekor dengan rencana perluasan hingga 10.000 ekor.

"Persiapan kurban insya Allah aman, cukup sampai kita Iduladha nanti. Saya sudah terima laporannya dan aman. Jumlahnya sangat cukup," ujarnya.

Amran mengaku, saat ini pihaknya aktif memonitor ketersediaan hewan kurban di seluruh daerah yang ada di Indonesia untuk memastikan ketersediaannya. Dirinya juga menyebut pemerintah akan fokus memastikan dari aspek kesehatan hewan dengan melakukan berbagai langkah penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kurban tahun ini.

"Kami memastikan sertifikat kesehatan ternak yang dilalulintaskan sudah lengkap, memeriksa ear tag untuk menjamin ternak telah teregister dan kami menerjunkan petugas kesehatan hewan di kabupaten/kota untuk melakukan pengecekan rutin di penam-

pungan ternak," ujarnya.

Selain itu, Amran juga memastikan pasokan hewan kurban yang mencapai 2,06 juta ekor dengan terdiri atas sapi, kerbau, kambing, dan domba di seluruh Indonesia untuk Iduladha dipastikan aman dan mencukupi.

"Insya Allah aman. Dirjen sudah melapor ke saya, jadi dipastikan aman, jumlahnya juga cukup untuk (Iduladha)," ucapnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), secara nasional, kebutuhan hewan kurban berada pada angka 1,97 juta ekor, dengan ketersediaannya yang mencapai 2,06 juta ekor, maka ketersediaan hewan kurban tahun ini berpotensi surplus hingga 88 ribu ekor.

Meski dari data tersebut dipastikan jumlah ketersediaan hewan kurban baik, sapi, kerbau, kambing maupun domba untuk memenuhi kebutuhan nasional sangat mencukupi bahkan surplus.

"Jadi untuk kebutuhan dan keterse-

diaan hewan kurban kami pastikan aman," ucapnya kembali.

Kementerian Pertanian sendiri juga telah melakukan pemetaan akan kebutuhan berkurban untuk seluruh wilayah Indonesia mulai dari yang defisit hingga surplus produksi peternakan.


Selain itu, pemerintah dalam hal ini siap melakukan intervensi apabila terjadi kekurangan kebutuhan kurban di daerah tertentu dengan cara memobilisasi produksi dari daerah surplus ke wilayah yang defisit.

Sementara Penjabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Ony menambahkan, pihaknya berterima kasih kepada Kementerian Pertanian yang telah peduli dan membantu peternak yang ada di Kabupaten Tangerang.

"Senangnya kami memiliki 3 tempat seperti ini. Oleh karena itu, kami berharap Kementerian Pertanian bisa terus mendukung dan memberikan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang," tuturnya. **(H-36)*****

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Menteri Pertanian Cek Ketersediaan Hewan Kurban	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Satelit News	
Page	7	
Author	Alfian/Aditya	



WAWANCARA: Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman saat wawancara di peternakan milik PT LSAJ yang berada di Desa Mekarsari, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Kamis (6/6).

Menteri Pertanian Cek Ketersediaan Hewan Kurban

Kunjungi Peternakan di Kecamatan Jambe

SATELITNEWS, TANGERANG - Menjelang Idul Adha 1445 Hijriah/2024 Masehi, Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI), Andi Amran Sulaiman melakukan pengecekan hewan kurban di peternakan milik PT. Lembu Setya Abadi Jaya (LSAJ) yang berada di Desa Mekarsari, Kecamatan Jambe, Kamis (6/6).

"Selain mengecek hewan kurban, kunjungan ini juga untuk melihat potensi perkembangan ekonomi desa, dari sektor hewan khususnya sapi. Ditambah, saat ini umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah," kata Mentan RI Andi Amran Sulaiman kepada Satelit News, Kamis (6/6).

Menurut Andi, konsep peternakan sapi yang dilakukan oleh PT. LSAJ ini sangat membantu dan menyejahterakan masyarakat. Pasalnya, penerapannya ini, dinilai dapat membuat masyarakat berkembang,

sejahtera dan sangat baik. Sehingga, konsep peternakan PT. LSAJ dapat diterapkan di seluruh Indonesia.

"Model yang dibangun oleh PT. LSAJ ini bagus. Bisa diterapkan atau percontohan untuk peternak di Indonesia. Konsepnya luar biasa dan ini akan kami kembangkan nantinya di seluruh wilayah Indonesia," tukasnya.

Dia mengatakan, pihaknya telah mencatat hampir satu juta sapi telah disiapkan untuk Hari Raya Idul Adha 1445 H/2024 M. Andi juga menegaskan, ketersediaan hewan kurban di Indonesia sudah mulai stabil. Bahkan, keseterediaan pangan, seperti beras dan jagung juga dinyatakan aman.

"Insyaallah aman di Indonesia, disiapkan 1 juta sapi. Pangan juga aman, beras sudah stabil dibawah HPP," tandasnya.


Kata Andi, bahwa Kementerian Pertanian Indonesia akan terus mendukung segala bentuk pertanian dan peternakan, baik melalui regulasi ataupun kebijakan. Bahkan, fasilitasi permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan ke-

mudahan izin-izin import.

"Saya perintahkan kepada direktur supaya antarkan izinnya ke lapangan. Karena konsepnya ini adalah membantu masyarakat, plasmanya 90 persen. Artinya betul ingin melihat masyarakat berkembang dan sejahtera. Konsep inilah yang akan kami bangun di Indonesia nantinya," tegasnya.

Ditempat yang sama, Penjabat (Pj) Bupati Tangerang, Andi Ony Prihartono menambahkan, bahwa PT. LSAJ saat ini memiliki sekitar 1.500 ekor sapi. Sementara total kapasitas yang dimiliki PT. LSAJ sebanyak 2.500 ekor sapi. Andi berharap, kedepan Mentan dapat terus membina dan membantu para peternak sapi yang ada di Kabupaten Tangerang.

"Terima kasih atas kunjungannya Pak Menteri di Kabupaten Tangerang. Kita memiliki 3 tempat seperti ini, oleh karena itu kami berharap Kementerian Pertanian bisa terus memberikan dukungan dan memberikan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang," pintanya. **(alfian/aditya)**

Title	Petani Percepat Tanam Padi Gogo	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Satelit News	
Page	9	
Author	Ham	

Petani Percepat Tanam Padi Gogo

SATELITNEWS, LEBAK—Sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan, petani di Lebak melakukan percepatan tanam padi gogo. Hal ini sesuai arahan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. "Kita hari ini melakukan percepatan tanam padi gogo di Kecamatan Gunungkencana," kata Kepala Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Deni Iskandar saat dikonfirmasi di Rangkasbitung, Lebak, Kamis (6/6).

Percepatan tanam padi gogo di Kecamatan Gunungkencana sekitar 1.000 hektare dan bisa mempertahankan produksi pangan. Saat ini, percepatan tanam padi gogo gencar dilakukan di berbagai daerah di Kabupaten Lebak menyusul curah hujan cukup tinggi. Percepatan tanam padi gogo dilakukan di lahan-lahan tidur yang ditelantarkan oleh perusahaan pengembang perumahan.

Belum lama ini, kata dia, petani di Kecamatan Maja, Curugbitung dan Sajira dilakukan percepatan tanam padi

gogo serentak. Begitu juga lahan milik BUMN, seperti Perum Perhutani dan PT Perkebunan Nusantara, seperti di Kecamatan Gunungkencana, Banjarsari, Cijaku, Cigembong, Cimarga dan Leuwidamar dilakukan percepatan tanam padi gogo melalui sistem tumpang sari dengan tanaman lainnya.

"Kami sudah menjalin kerja sama dengan pihak perusahaan pengembang maupun BUMN untuk dimanfaatkan petani untuk mempertahankan produksi pangan," kata Deni menambahkan. Menurut dia, para petani yang melakukan percepatan tanam padi gogo menggunakan benih umur pendek dan bisa dipanen 75-85 hari hasil pengembangan pemuliaan dari Perguruan Tinggi Indonesia.

Untuk benih umur pendek varietas Gamogora 7 dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjamada Yogyakarta dan benih varietas padi gogo ipb 3 dari Fakultas Pertanian Insitut Pertanian Bogor, Jawa Barat. Benih varietas itu masuk kategori benih unggul dan kualitas


berasnya cukup bagus dan jika petani tanam padi gogo pada Juni 2024 dipastikan panen September mendatang. Karena itu, mereka petani pada percepatan tanam padi gogo menggunakan benih varietas dari perguruan tinggi itu.

Saat ini, berdasarkan data produksi pangan dari pertanian padi gogo dari Januari - Mei 2024 tercatat sebanyak 9.000 ton setara beras dengan panen seluas 2.832 hektare. "Kami mendorong petani padi gogo agar terus mempercepat tanam setelah panen untuk menggenjot produksi pangan sesuai kebijakan Kementerian Pertanian," kata Deni.

Sementara, sejumlah petani di Kecamatan Gunungkencana mengatakan bahwa mereka melakukan percepatan tanam padi gogo di lahan milik Perum Perhutani karena untuk menggenjot produksi pangan keluarga. "Kami setiap tahun bisa memenuhi ketersediaan pangan keluarga dari hasil panen padi gogo itu," kata Hasan (55) seorang petani gogo di Gunungkencana Kabupaten Lebak. (bnn)



PADI GOGO: Petani di Kabupaten Lebak sedang menanam padi padi gogo. ISTIMEWA

Title	PI Optimasi Community Forest	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Inilah Koran	
Page	2	
Author	Dar	

PI Optimasi Community Forest

GUNA menggenjot produktivitas petani, PT Pupuk Indonesia (PI) mendukung optimasi ratusan hektare lahan pertanian di Sukabumi melalui program Community Forest.

Direktur Utama PI Rahmad Pribadi mengatakan, ratusan hektare lahan pertanian tersebut milik Kostrad. Lokasinya berada di Desa Neglasari, Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Menurut program *Community Forest*, dilaksanakan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) selaku anak perusahaan PI. Program itu diyakini mampu mengurangi emisi karbon atau dekarbonisasi, sekaligus memberikan pembinaan guna meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

"Pada kesempatan ini, kita melihat kesuksesan panen jagung dan singkong di wilayah pertanian binaan TNI AD dan Kostrad yang bisa menjadi bentuk nyata dalam mendukung ketahanan pangan nasional," kata Rahmad, Kamis (6/6).

Dia menuturkan, pada saat itu dilakukan panen jagung dan singkong di lahan ketahanan pangan (Hampangan) Kostrad yang dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Menteri Pertanian



dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, serta Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa.

Panen dilakukan pada lahan jagung seluas 121,98 hektare dan singkong 308,34 hektare untuk singkong. Rombongan juga meninjau proses pemipilan dan pengeringan jagung.

Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berharap kegiatan panen bersama ini dapat memperkuat sinergi antara TNI dan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan produksi pangan nasional serta kesejahteraan masyarakat. Hampangan Kostrad dikelola 418 personel militer yang terdiri dari staf, pengawas, dan ke-

lompok tani sekitar.

"Saya sengaja mengajak Menteri Pertanian Amran Sulaiman ke lokasi ketahanan pangan di Desa Neglasari untuk bersama-sama melaksanakan panen raya jagung dan singkong. Pak Mentan sangat mengapresiasi program ini serta sepakat untuk menjadikan program ketah-

anan pangan Kostrad yang dilaksanakan ini sebagai proyek percontohan untuk daerah lain di Indonesia," kata Maruli.

Amran Sulaiman merasa takjub lantaran program ketahanan pangan yang digagas Kasad berhasil, meskipun lokasinya berada di pelosok dengan keterbatasan

akses dan medan yang berat. Keberhasilan program ini terlihat dari hasil produktivitas panen jagung dan singkong yang telah dilaksanakan.

"Dengan kondisi medan yang berat dan berada di pelosok, tetapi berhasil mendorong hasil pertanian dengan memanfaatkan lahan tidur yang awalnya hanya se-

mak belukar. Daerah lain harus mencontoh dan harus bisa apalagi lahannya berada di lokasi yang mudah dijangkau dan didukung dengan akses. Kementerian Pertanian RI pun sangat mendukung dengan apa yang telah dilaksanakan mantan Pangkostrad itu melalui program bantuan peralatan pertanian, benih dan lain sebagainya," ujar Amran.


Di bagian lain, dia memastikan program pompanisasi yang diterapkan di Jabar bisa menjaga produktivitas padi di lahan sawah selama musim kemarau.

Amran menegaskan, program pompanisasi merupakan salah satu solusi cepat dan tepat untuk melindungi lahan pertanian dari risiko kekeringan, sehingga produksi pangan di wilayah tersebut bisa lebih optimal.

"Kami siapkan pompa untuk Jabar. Beberapa waktu lalu sudah disalurkan sebanyak 10 ribu unit," ujarnya.

Terkait stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Iduladha 1445 H, Amran menyebutkan sejauh ini stok pangan relatif aman. Saat ini, kata dia, beras sudah stabil bahkan ada di bawah harga pokok penjualan (HPP). Secara nasional, ketersediaan pangan seperti beras, jagung, dan lainnya kini dalam keadaan stabil dengan harga yang relatif terjangkau.

"Mengenai ketersediaan hewan kurban sebagai kebutuhan masyarakat pada Iduladha tahun ini pun aman. Dimana, terdapat 2,06 juta ekor yang terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan domba," tuturnya. (dnr)

Title	Jelang Lebaran Kurban Stok Hewan Kurban di Pasuruan Melimpah	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Harian Bhirawa	
Page	8	
Author	Hil.gat	

Jelang Lebaran Kurban, Stok Hewan Kurban di Pasuruan Melimpah

Pasuruan, Bhirawa

Jelang lebaran kurban, permintaan hewan kurban di Kabupaten Pasuruan meningkat pesat. Meski demikian, ketersediaan hewan kurban sangat mencukupi. Bahkan pasokan hewan kurban masih banyak.

"Tahun ini, permintaan hewan kurban sangat meningkat bila dibandingkan dengan tahun kemarin. Untung stok hewan kurban masih melimpah. Yakni, sapi ada 14.858 ekor, kambing 17.342 ekor serta domba 27.455 ekor," ujar Kepala Dinas Kesehatan Dan Peternakan Hewan, Ainur Alfia, Kamis (6/6) sore.

Berdasarkan data saat ini, permintaan sapi untuk hewan kurban tahun 2024 mencapai 2.902 ekor, kambing 6.981 ekor serta domba 3.921 ekor.

Sedangkan untuk tahun lalu, permintaan hewan kurban sapi sebanyak 2.495 ekor, kambing 6.508 ekor hingga domba 1.982 ekor.

Menurut Ainur, pihaknya juga sedang melakukan langkah-langkah kewaspadaan dan pengendalian penyakit hewan menular. Itu berdasar dari surat Kementerian Pertanian yang telah diterima sebelumnya. Poin utamanya adalah pelarangan jual dan beli ternak rentan PMK.

Termasuk, produk dari wilayah yang sedang ada kasus PMK dilarang memasuki wilayah yang bebas penyakit menular.


Selain itu, juga akan melakukan pengawasan lalu lintas hewan ternak yang rentan PMK. Hingga akan menerapkan biosecurity dan melakukan sosialisasi kepada peternak untuk pembersihan kandang dengan menggunakan vaksinasi.

"Kita juga melaksanakan penanganan terhadap hewan yang terindikasi sakit dengan tindakan pengobatan dan penerapan biosekuriti yang ketat. Vaksinasi ternak rentan PMK dan LSD juga kami lakukan sesuai juknis dan SOP program vaksinasi," kata Ainur Alfia. [hil.gat]



Petugas saat melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Pasuruan. Stok hewan kurban di Kabupaten Pasuruan melimpah.

hims husan/bhirawa

Title	Jutaan Penduduk Dunia Alami Krisis Pangan Indonesia Antisipast Darurat Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Harian Bhirawa	
Page	8	
Author	Cyn.gat	

Jutaan Penduduk Dunia Alami Krisis Pangan, Indonesia Antisipasi Darurat Pangan



Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi.

Dampak dari Certification Of Vaccination Identification (Covid) 19, geopolitical tension khususnya perang Rusia-Ukraina, dan climate change atau perubahan iklim sangat terasa khususnya dalam hal pangan. Sehingga situasi dunia dalam kondisi tidak menentu dengan sekitar 60 negara mengalami krisis pangan dan 900 juta penduduk dunia terdampak krisis pangan.

“Dari berbagai masalah tersebut berdampak pada produksi pangan global terganggu, di Indonesia, sejak bulan Februari 2023 hingga Maret 2024, kita mengalami fenomena alam yang disebut El Nino, kemarau yang berkepanjangan. Sedangkan solusi mengatasi krisis pangan tersebut, kita harus Swasembada pangan,” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan) Dedi Nursyamsi, Kamis (6/6), kepada wartawan.


Masih dia katakan, kebutuhan pangan salah satunya beras adalah kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Sedangkan dalam se-bulan, kebutuhan beras dalam negeri tidak kurang dari 2,6 juta ton atau setara 1 juta hectare (ha) luas panen dengan produktivitas seberat 5,2 ton per hektare. Dan konsumsi beras dalam negeri setiap bulannya tidak kurang dari 2,6 juta ton atau setara 1 juta hektare luas panen dengan produktivitas 5,2 ton per hektare. Sementara Indonesia hanya mampu menghasilkan beras 30,2 juta ton per tahun. Artinya, kita masih defisit 1 juta beras.

Belum lagi, lanjut Dedi, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 2,5 juta ton, berarti jika dijumlah kurang lebih 3,5 juta ton beras setiap tahun. Itu setara dengan 7 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Karena berdasarkan data yang ada, pada Maret 2024, petani baru bisa menanam seluas 800.000 hektare atau dengan kata lain terjadi kekurangan tanam seluas 300.000 hektare, yang akibatnya akan defisit beras.

“Oleh karena itu, kita harus melakukan perluasan tanam dan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) kita di lahan rawa dan lahan tadah hujan, agar produksi beras kembali melimpah,” ujarnya.

Menurutnya, Kementan saat ini tengah fokus menggenjot produksi dua komoditas pokok, yaitu padi dan jagung nasional melalui optimalisasi lahan rawa, posipanisasi, dan tumpang sisis padi gogo di lahan perkebunan.

Sedangkan untuk optimalisasi rawa sedang dilakukan di 11 provinsi dengan target meningkatkan IP 100 menjadi 200 untuk daerah yang sudah dilakukan Survei Investigasi dan Desain (SID). Selain itu, lahan rawa kita umumnya hanya tanam satu kali dalam satu tahun. [cyn.gat]

Title	Perbarui Data Setiap Empat Bulan	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Cianjur Ekspres	
Page	1 Part 1	
Author	Ant	




IST

Suasana Pertanian Indonesia.

Perbarui Data Setiap Empat Bulan

JAKARTA - Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi mengatakan bahwa pemerintah membuka ruang untuk memperbarui data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) setiap empat bulan sekali, dimulai pada 5-18 Juni 2024.

“Bagi petani yang belum bisa mendapatkan pupuk bersubsidi karena tidak terdata di RDKK 2024, ruang ini adalah momen untuk mendaftar ke dalam RDKK dengan menghubungi penyuluh di wilayah kecamatannya masing-masing,” ujar Tri Wahyudi, di Jakarta, kemarin (6/6).

Title	Perbarui Data Setiap Empat Bulan	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Cianjur Ekspres	
Page	1 Part 2	
Author	Ant	

Perbarui Data...

dari halaman 1

Tri Wahyudi menegaskan bahwa salah satu poin penting dari perubahan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 menjadi Permentan 01/2024, yaitu data RDKK dapat dievaluasi di tahun berjalan atau setiap caturwulan sekali.

Sedangkan, di beleid sebelumnya data ini tidak bisa diubah di tahun berjalan.

“Update yang dijadwalkan hingga tanggal 18 Juni mendatang adalah update perdana,” kata Tri Wahyudi.

Adapun syarat petani agar bisa terdata di RDKK dan menjadi penerima manfaat pupuk bersubsidi, sesuai Permentan 01/2024, mereka harus menggarap lahan maksimal 2 hektare dan bergabung dengan kelompok tani (poktan).

Petani juga melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan padi, jagung, dan kedelai, serta subsektor tanaman hortikultura cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan subsektor perkebunan tebu rakyat, kakao, dan kopi.

Dia menambahkan, up-

date RDKK yang saat ini dilakukan pemerintah tidak hanya menginput petani yang sebelumnya tidak terdata di RDKK.

Akan tetapi, petani juga bisa menambahkan luas lahan dan pupuk pada musim tanam tertentu yang sebelumnya tidak masuk dalam RDKK.

“Untuk dua perubahan ini akan ada verifikasi dan persetujuan berjenjang, sampai dengan kepala dinas pertanian setempat,” ujar Tri Wahyudi.

Pembaruan selanjutnya adalah penambahan volume pupuk bagi NIK eksisting yang telah terdaftar dengan batas maksimal dosis rekomendasi.

Pembaruan terakhir adalah untuk pembaruan volume pupuk organik bagi NIK eksisting yang telah terdaftar sesuai dosis rekomendasi wilayah.

“Permentan 01/2024 juga menambah jenis pupuk yang disubsidi, yaitu memasukkan kembali pupuk organik ke dalam skema subsidi. Sebelumnya pupuk yang disubsidi hanyalah Urea, NPK, dan NPK formula khusus kakao,” ujarnya pula.

Lebih lanjut, Tri Wahyudi menjelaskan pemerintah juga memberi kemudahan pada proses penebusan pupuk bersubsidi. Petani cukup datang ke kios dan membawa KTP.


Apabila petaninya berhalangan datang ke kios untuk bertransaksi, penebusan sudah bisa diwakilkan oleh keluarga atau kelompok tani dengan membawa surat kuasa.

Perubahan kebijakan di Permentan 01/2024 ini memudahkan bagi petani yang mungkin sudah lanjut usia (lansia) atau terkendala transportasi, sehingga tidak memungkinkan datang ke kios. Ini juga sekaligus menjadi solusi bagi petani yang alih lahan.

Sementara untuk memudahkan penebusan, Pupuk Indonesia juga melengkapi kios dengan aplikasi iPubers.

Aplikasi ini hasil sinergi antara Pupuk Indonesia dengan Kementerian Pertanian.

Tri menyampaikan kemudahan yang diperoleh petani, dikarenakan Pupuk Indonesia juga memperbaiki sistem di kios melalui aplikasi iPubers. **(ant)**

Title	Aep Minta Pastikan Hewan Kurban Layak Konsumsi	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Warta Kota	
Page	8	
Author	Maz	

Aep Minta Pastikan Hewan Kurban Layak Konsumsi

► 214 Anggota Pemeriksa Hewan Kurban Mulai Bekerja H-10

Karawang, Warta Kota

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melepas 214 anggota tim pemeriksaan hewan kurban dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) di Bale Indung Nyi Pager Asih, Pemda Karawang, Kamis.(6/6/2024).

Mereka disebar guna memeriksa kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha 1445 Hijriah.

Bupati Karawang, Aep Syaepuluh meminta tim pemeriksaan hewan kurban ini bekerja semaksimal mungkin guna memastikan hewan kurban yang dijual dalam sehat dan aman dikonsumsi.

"Jadi seluruh hewan kurban yang dijual bakal diperiksa oleh tim pemeriksaan tersebut," kata Aep. Dia juga menegaskan jika memang nantinya ada hewan kurban yang ditemukan sakit harus segera ditangani Penanganannya itu dengan memberikan vitamin kepada hewan kurban.

"Kalau pun nantinya memang terlihat sehat, tetap harus dipantau kesehatannya. Dan jika memang terlihat kurang sehat, harus segera diberikan vitamin agar menjadi sehat,"



Warta Kota/Muhammad Azzam

FOTO BERSAMA

— Tim pemeriksaan hewan kurban Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Karawang foto bersama di Bale Indung Nyi Pager Asih, Pemda Karawang, Kamis,(6/6/2024). Tim beranggotakan 214 orang.

ungkap Aep.

Akan tetapi, jika hewan kurban itu alami sakit dan tidak bisa ditangani. Maka hewan kurban itu jangan dijual. Aep menegaskan jika penjual hewan kurban tetap membandel menjual hewan kurban yang sakit akan diberikan sanksi.

"Kalaupun nanti ada temuan hewan kurban yang sakit, itu kita tegaskan untuk tidak dijual. Kalaupun memang masih membandel ada sanksinya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PKP Karawang, Rohman, me-

nyampaikan tujuan dibentuk tim pemeriksaan hewan kurban ini untuk mendapatkan hewan kurban yang sehat dan layak konsumsi sesuai dengan syariat islam dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114 tahun 2024.


"Mereka akan bertugas mulai dari H-10 sampai H-1 Iduladha. Kemudian dilanjutkan lagi pada hari H untuk pemeriksaan setelah penyembelihan atau pemeriksaan di post mortem," ungkap Rohman.

Selain itu, Ia juga menerangkan bahwa hewan kurban

yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksaan hewan kurban akan diberikan tanda dengan kalung sehat.

Dan Ia juga mengimbau agar masyarakat membeli hewan kurban yang sudah diperiksa oleh tim pemeriksaan hewan kurban.

"Nanti ada cirinya kalau yang sudah di cek oleh tim, itu ada kalung. Tapi ada juga yang bawaan langsung dari hewannya, biasanya ditelinga hewan kurban. Itu bisa dicek dan di-scan langsung," tuturnya. (maz)

Title	Aplikasi IPubers Diluncurkan	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Batam Pos	
Page	16 Part 1	
Author	JP Goup & Gustia Benny	



F. PT PUPUK INDONESIA

PEMERINTAH menambah banyak alokasi pupuk bersubsidi tahun ini.

Aplikasi I-Pubers Diluncurkan

Reporter : JP GROUP
Editor : GUSTIA BENNY

JAKARTA (BP) - Memasuki musim tanam kedua, ketersediaan pupuk bagi petani menjadi perhatian utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kementerian Pertanian telah memperluas jenis pupuk bersubsidi yang tersedia, kini termasuk pupuk organik di samping urea, NPK, dan NPK formula khusus.

Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2024 dan bertujuan untuk mendukung praktik pertanian berkelanjutan serta meningkatkan produktivitas di seluruh Indonesia. Sagio, anggota Kelompok Tani Karya Tani di Sumatra Utara, melaporkan adanya peningkatan dalam alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan peraturan baru tersebut.

"Alokasi urea kami meningkat menjadi 134 kg, naik 64 kg, dan NPK menjadi 159 kg, meningkat 105 kg. Kami yakin tambahan ini akan meningkatkan produktivitas dari 3 ton menjadi 5-7 ton," ujarnya, Kamis (6/6).

Distribusi pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke petani dilakukan berdasarkan data e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), dengan batas alokasi per kecamatan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati atau Wali Kota. Alokasi ini dirinci berdasarkan jenis pupuk, jumlah,

dan sebaran wilayah, dengan mempertimbangkan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).


Untuk mempermudah proses ini, Pupuk Indonesia bersama Kementan telah meluncurkan aplikasi *I-Pubers* secara nasional. Aplikasi digital ini memudahkan petani dalam menebus pupuk bersubsidi, karena cukup dengan membawa e-KTP asli ke kios.

Petugas kios akan memindai e-KTP menggunakan aplikasi *I-Pubers* yang kemudian merekam transaksi, serta mengambil foto e-KTP dan wajah petani dengan fitur *geo-tagging* dan *timestamp* untuk verifikasi. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Ali Jamil menjelaskan, mekanisme penyaluran pupuk menggunakan aplikasi *I-Pubers* melibatkan petani yang hanya perlu menunjukkan



BIRO

BLIK

Title	Aplikasi IPubers Diluncurkan	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Batam Pos	
Page	16 Part 2	
Author	JP Goup & Gustia Benny	

Aplikasi I-Pubers Diluncurkan

Sambungan dari hal 16

e-KTP untuk memindai NIK mereka agar dapat mengakses data alokasi petani.

Dalam proses ini, kios akan menginput jumlah transaksi sesuai kebutuhan, dan petani dapat menandatangani bukti transaksi secara elektronik melalui aplikasi tersebut. "e-KTP ini akan di foto berikut orang yang mengambilnya menggunakan aplikasi *iPUbers*. Bukti transaksi semua tersimpan secara digital," ungkap Ali Jamil.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh menjelaskan, insiatif digital ini merupakan kontribusi Pupuk Indonesia untuk memastikan proses yang mudah dan sederhana namun tetap akuntabel.

"Dengan mengimplementasikan aplikasi *I-Pubers* di

lebih dari 27.000 kios pupuk, kami memastikan pupuk subsidi dapat ditebus oleh petani yang berhak sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan. Sistem ini tidak hanya memudahkan proses penebusan, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengawasan distribusi pupuk bersubsidi," papar Tri.


Para pengecer juga mengapresiasi sistem baru ini. Paijo, petugas di Kios Pupuk UD Les-tari Abadi, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mencatat kemudahan yang diberikan. "Sekarang, petani cukup membawa e-KTP saja, prosesnya menjadi lebih mudah dan praktis," katanya.

Dengan penambahan jenis pupuk bersubsidi dan kemudahan penebusan melalui aplikasi *I-Pubers*, diharapkan produktivitas pertanian di Indonesia semakin meningkat

dan ketahanan pangan nasional semakin terjamin. Perubahan dalam tata kelola distribusi pupuk bersubsidi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan pupuk bersubsidi tepat sasaran dan mudah diakses oleh petani yang membutuhkan.

Bagi petani yang memenuhi syarat penerima pupuk subsidi namun tidak memiliki e-KTP, mereka dapat mengunjungi pemerintah daerah atau kelurahan setempat untuk mendapatkan bantuan. Penebusan pupuk bersubsidi juga dapat diwakilkan oleh anggota keluarga dengan syarat membawa e-KTP yang mewakilkan, e-KTP petani, kartu keluarga, serta surat kuasa.

Di tengah musim tanam yang krusial ini, langkah ini diharapkan dapat mendukung petani dan memastikan sektor pertanian Indonesia tetap kuat. (*)

Title	Mentan Amran Pastikan Stok Hewan Kurban Aman	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Warta Kota	
Page	5	
Author	M28	

Mentan Amran Pastikan Stok Hewan Kurban Aman

Tangerang, Warta Kota

Kementerian Pertanian (Kementan) RI memastikan stok sapi sebagai hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha 1445 Hijriah dalam kondisi mencukupi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman sesul menjelang langsung PT Lembu Setia Abadi Jaya (LSAJ) di Mekarsari, Jambie, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (6/6/2024).

"Stok hewan kurban untuk persiapan Iduladha insyaallah aman, cukup sampai Iduladha nanti. Saya sudah terima laporannya dan aman, jumlahnya sangat cukup," ujar Amran kepada awak media.

Amran menyebut, saat ini pihaknya aktif memonitor ketersediaan hewan kurban di seluruh daerah yang ada di Indonesia untuk

memastikan bahwa ketersediaan hewan kurban memadai.

Selain itu pemerintah juga fokus pada penanganan aspek kesehatan hewan yang akan dikurbankan oleh masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan dengan menggelar berbagai langkah, penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Iduladha tahun ini.

"Kami memastikan sertifikat kesehatan ternak yang ditahapilaskan sudah lengkap, memeriksa ear tag untuk menjamin ternak telah teregister dan kami menerjunkan petugas kesehatan hewan di kabupaten/kota untuk melakukan pengecekan rutin di penampungan ternak," kata Amran.

Amran menjelaskan, Kementan RI dipastikan akan turun tangan untuk menangani apabila didapati kekurangan

kebutuhan hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha.

Amran mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan kebutuhan hewan kurban di seluruh wilayah Indonesia. "Kebutuhan hewan kurban di masyarakat akan kami pantau langsung dengan beragam cara dan upaya, di antaranya telah mobilisasi produksi dari daerah surplus ke wilayah yang defisit," ujar Amran.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), secara nasional kebutuhan hewan kurban berada pada angka 1,57 juta ekor, dengan ketersediaannya yang mencapai 2,06 juta ekor.

Dengan jumlah tersebut dipastikan ketersediaan hewan kurban pada tahun 2024

ini berpotensi surplus hingga 88.000 ekor.

Berdasarkan data tersebut, Mentan Amran memastikan jumlah ketersediaan hewan kurban baik sapi, kerbau, kambing maupun domba untuk memenuhi kebutuhan nasional sangat mencukupi bahkan surplus," terang Amran.

"Jadi untuk persiapan kurban aman, 1 juta cukup, tapi yang terpenting untuk waktu yang akan datang kami akan kembangkan model peternakan lebih baik lagi," imbuhnya.

Menurut Amran, pihaknya juga akan fokus memastikan aspek kesehatan hewan dapat tetap terjaga dengan melakukan berbagai langkah penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kurban tahun ini.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Mentan Amran tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB.

Mentan didampingi Wakilpolri Komjen Pol Agus Andrianto.


Setibanya di lokasi mereka langsung disambut oleh Penjabat (PJ) Bupati Tangerang Andi Ony Prihariono bersama Wakilpolri Banten Brigjen Pol Sabtilul Alif dan pengelola PT LSAJ. Selanjutnya Mentan bersama rombongan langsung diajak untuk berkeliling area peternakan PT LSAJ Farm yang memiliki luas area 22,5 hektare.

Pada area peternakan itu Amran diperlihatkan kandang khusus penggemukan sapi, peternakan ikan, hingga sebuah pabrik pakan mini berkapasitas 40 ton dalam satu harinya.

Mentan dan rombongan juga melihat 1.900 ekor sapi di lahan seluas puluhan hektare menggunakan kendaraan mobil listrik yang telah disediakan. (m28)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Title	Penutupan Industri Jual Daging Anjing	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Batam Pos	
Page	6	
Author	JP Goup & Andriani Susilawati	

Korea Selatan Masih Terpecah

Penutupan Industri Jual Daging Anjing

Reporter : JP GROUP
EDITOR : ANDRIANI SUSILAWATI

SEOUL (BP) - Kelompok-kelompok advokasi hewan, dan pemangku kepentingan industri daging anjing di Korea Selatan masih terpecah mengenai seberapa cepat mengakhiri perdagangan daging anjing.

Pada awal tahun ini, Majelis Nasional meloloskan rancangan undang-undang untuk membasmi konsumsi daging anjing, yang telah lama dipraktikkan di Korea Selatan.

Kelompok-kelompok advokasi hewan menyerukan untuk segera mengakhiri praktik tersebut, melalui penyelamatan dan euthanasia sebelum RUU tersebut berlaku secara penuh pada tahun 2027.

Sementara para peternak daging anjing berargumentasi untuk mengakhiri secara alamiah, budaya makanan yang sudah ada sejak lama ini.

Menurut Kementerian Pertanian, Pangan dan Urusan Pedesaan Selasa (4/6), lebih dari 500.000 anjing dibesarkan untuk konsumsi manusia oleh total 1.507 peternak anjing di Korea Selatan.

Angka tersebut lebih besar atau sama dengan penelitian terbaru pemerintah, yang memperkirakan sekitar 1.156 peternak anjing memelihara lebih dari 520.000 anjing, untuk konsumsi daging di seluruh negeri.

Lebih dari separuh atau 53,6 persen, dari fasilitas praktik penjualan daging dimiliki oleh mereka yang berusia di atas 65 tahun, yang hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki pengalaman bekerja di bidang lain.

Di bawah undang-undang khusus, yang disahkan di bawah persatuan politik yang langka pada bulan Januari, memelihara atau menyem-

belih anjing untuk konsumsi manusia akan menjadi ilegal di Korea mulai tahun 2027.

Para pemangku kepentingan industri harus menyerahkan rencana, yang menguraikan langkah-langkah untuk merampingkan, dan akhirnya menutup bisnis mereka.

Menurut pandangan Asosiasi Penjualan Anjing yang dapat dimakan Korea Selatan, dibutuhkan waktu sekitar dua setengah tahun, sampai industri ini benar-benar tutup dan menghilang.

Perhitungan ini, didasarkan pada perkiraan bahwa sekitar 200.000 anjing dijual setiap tahunnya di pasar.

Pada tahun 2027, tanpa adanya pengembangbiakan tambahan, negara ini akan mengalami akhir alamiah dari budaya makanan, dan tradisi kuno dalam masa tenggang tiga tahun.

Dimana menurut asosiasi Asosiasi Penjualan Anjing, terlalu singkat untuk transisi profesi bagi para peternak dan peritel daging anjing.

Khususnya, asosiasi ini mengajukan petisi pada bulan Maret 2024 atas nama para pemangku kepentingan daging anjing di negara tersebut, ke pengadilan tinggi untuk membatalkan larangan perdagangan dan konsumsi daging anjing.

Dengan peluang menang yang kecil, gugatan tersebut mengklaim bahwa undang-undang khusus tersebut, melanggar hak-hak dasar masyarakat untuk memilih profesi dan makanan yang akan dikonsumsi.

Sebaliknya, kelompok-kelompok hak asasi hewan percaya bahwa industri ini harus diakhiri dengan segala cara, dengan alasan bahwa konsumsi anjing itu sendiri sudah ilegal di bawah Undang-Undang Sanitasi Makanan. (*)



PARA aktivis hak-hak hewan mengadakan protes penjualan daging anjing (25/5).


Title	Sarolangun Dapat Kucuran Rp 12 Miliar dari Kementan	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Jambi Ekspres	
Page	5	
Author	Hnd	



FOTO: HADNATA/JAMBEKSPRES

TINJAU: Pj Bupati Sarolangun Bachril Bakri saat meninjau pembangunan Smart Green House di Kecamatan Singkut.

Sarolangun Dapat Kucuran Rp 1,2 Miliar dari Kementan

Bangun Smart Green House Tingkatkan Hasil Pertanian

SAROLANGUN - Pemerintah Kabupaten Sarolangun dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati Sarolangun Dr Ir Bachril Bakri, mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia berupa program Smart Green House.

Smart Green House adalah salah satu upaya Kementerian Pertanian senantiasa melakukan upaya-upaya

pertanian baik melalui lahan datar maupun teknologi guna menghasilkan produk pertanian berkualitas.

Penjabat Bupati Sarolangun Bachril Bakri mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun mendapatkan bantuan senilai Rp 1,2 miliar untuk pembangunan dua unit smart Green House dan dua unit smart green house konvensional.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Pertanian, yang telah membantu kabupaten Sarolangun. Total biaya bantuan kementerian pertanian membangun lokasi smart green house ini 1,2 miliar dari pemerintah

pusat sebanyak 4 unit ada di kabupaten Sarolangun, dua smart green house dan dua konvensional atau biasa. Smart ini bisa dibuat atap plastik, kayu dan juga baja ringan," katanya.

Menurut Bachril Bakri, program smart green house ini tentu sebagai hal baru yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun, sebab dalam penerapannya menggunakan teknologi baru.

Di mana kali ini dilakukan penanaman tanaman melon melalui media tanam planter bag yang sangat kuat hingga bisa enam kali penanaman.

"Jadi ada hal baru selama saya sebagai Pj Bupati, melihat lokasi penanaman yang merupakan satu teknologi baru rumah kaca atau smart house green, untuk ditempatkan penanaman tanaman melon,"ujarnya.

Smart green house ini, lanjut Bachril Bakri, tentu diharapkan agar bisa meningkatkan dan menghasilkan produk pertanian berkualitas sebab ini memiliki keunggulan seperti mengontrol suhu udara, air, pupuk hingga pengurangan hama.

Bahkan ia berharap agar nantinya program Smart Green House ini dapat

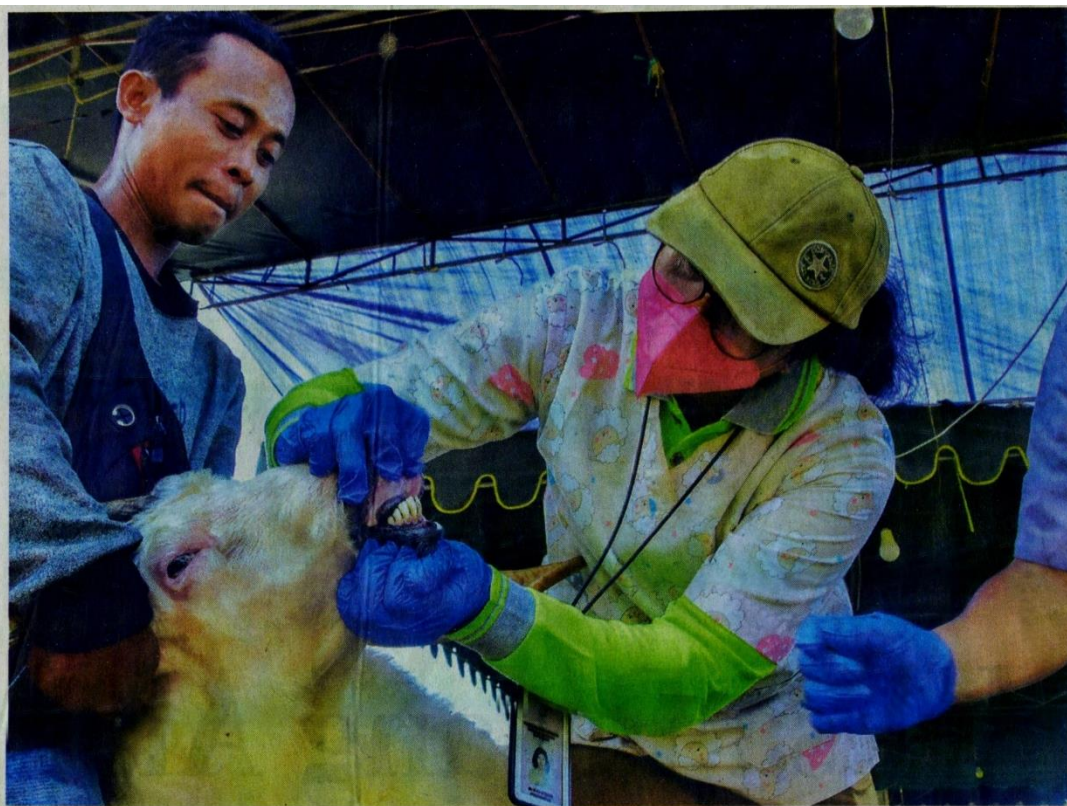
diterapkan di setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun untuk penanaman tanaman hortikultura seperti cabai, melon, tering dan sebagainya.

"Ini juga dalam rangka upaya kita mengendalikan inflasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Pertanian, yang telah membantu kabupaten Sarolangun untuk bisa mengendalikan inflasi melalui bantuan smart green house dan bantuan planter bag yang kualitasnya bagus dan kuat berwarna hitam dan tahan lama bisa sampai enam kali tanam," pungkasnya. **(hnd)**

Title	Sebar 120 Dokter Hewan ke Sentra Pedagang
Date	7 Juni 2024
Media	Surya
Page	3
Author	Bob



Kementerian Pertanian



PERIKSA HEWAN - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya mengantisipasi hewan kurban sakit menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah dengan menyebarkan ratusan petugas kesehatan ke sejumlah sentra penjualan hewan kurban.

Sebar 120 Dokter Hewan ke Sentra Pedagang

► Pastikan Kesehatan Hewan Kurban Jelang Idul Adha

SURABAYA, SURYA - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya mengantisipasi hewan kurban sakit menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Memastikan kesehatan hewan kurban tersebut, Pemkot menyebar ratusan petugas kesehatan ke sejumlah sentra penjualan.

Total, ada 120 dokter hewan dari DKPP Kota Surabaya yang diterjunkan. Mereka berasal dari Universitas Airlangga (Unair), Universitas Wijaya Kusuma (UWK), dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) cabang Kota Surabaya.

"Kami menerjunkan tim dokter dari DKPP Surabaya sekitar 25 orang beserta teman-teman mahasiswa," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Suharti dikonfirmasi di Pemkot Surabaya, Kamis (6/6).

Para dokter akan memastikan kesehatan hewan sesuai dengan aturan yang berlaku. "Kami ingin memastikan dari permohonan yang masuk, lapak-lapak di sini sudah memenuhi ketentuan, ada izinnya dan ada Surat Keterangan Kesehatan Hewan

(SKKH)," katanya.

Pemkot Surabaya telah mengeluarkan surat edaran. Tujuannya, memastikan lapak pedagang yang berada di kawasan mereka menjual hewan sesuai dengan persyaratan dari Pemerintah.

Di antaranya, bebas dari penyakit hewan menular strategis maupun zoonosis. Beberapa penyakit tersebut adalah Antraks, penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD) dan Peste Des Petits Ruminant (PPR).

Apabila pedagang tidak dapat menunjukkan SKKH, maka DKPP Kota Surabaya meminta yang bersangkutan melengkapi persyaratan. Namun apabila tidak kunjung memproses pengajuan, maka pedagang hewan kurban tidak dapat membuka lapaknya di Kota Pahlawan.

"Tahap awal, kami edukasi. Tahap berikutnya, kami berkolaborasi dengan Satpol PP, baik Satpol PP perwilayah atau Satpol PP Kota Surabaya (melakukan penertiban) karena ini menyangkut keamanan hewan kurban bagi masyarakat yang akan membeli," katanya.

” Kami ingin memastikan dari permohonan yang masuk, lapak-lapak di sini sudah memenuhi ketentuan, ada izinnya dan ada Surat Keterangan Kesehatan Hewan.

ANTIEK SUHARTI
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Aturan pada Pemkot Surabaya mengacu pada regulasi Kementerian Pertanian (Kementan) RI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. "Petugas DKPP Surabaya akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap hewan kurban tersebut," katanya.

Diprediksi, jumlah hewan kurban di Surabaya mencapai sekitar 11 ribu atau tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya. Pada 2023 lalu, data lapak penjualan mencapai 16.018 ekor (4.318 ekor sapi dan

11.700 ekor kambing).

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pasokan hewan kurban yang mencapai 2,06 juta ekor. Ini terdiri atas sapi, kerbau, kambing, dan domba di seluruh Indonesia.

"Insya Allah aman. Dirjen sudah melapor ke saya, jadi dipastikan aman, jumlahnya juga cukup untuk (Idul Adha)," ucap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat berkunjung ke Tangerang, Kamis (6/6/2024) dikutip dari keterangan resminya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), kebutuhan secara nasional hewan kurban berada pada angka 1,97 juta ekor, dengan ketersediaan mencapai 2,06 juta ekor. Potensi surplus mencapai 88 ribu ekor.

Pemerintah pusat telah melakukan pemetaan terkait kebutuhan kurban untuk seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pemerintah dalam hal ini siap melakukan intervensi apabila terjadi kekurangan kebutuhan kurban di daerah tertentu dengan cara memobilisasi produksi dari daerah surplus ke wilayah yang defisit. **(bob)**

Title	Nilai Tukar Petani Jawa Timur Naik 096 Persen
Date	7 Juni 2024
Media	Radar Surabaya
Page	2
Author	Mus/nug



Kementerian Pertanian

Nilai Tukar Petani Jatim Naik 0,96 Persen


KENDANGSARI - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Timur bulan Mei 2024 sebesar 108,61. NTP ini naik 0,96 persen dibandingkan bulan April 2024.

"Hal ini dipicu oleh kenaikan NTP di subsektor tanaman pangan sebesar 1,47 persen dan subsektor peternakan sebesar 0,98 persen," ujar Kepala BPS Jatim Zulkipli, Kamis (6/6).

Sementara itu subsektor lainnya mengalami penurunan yaitu subsektor hortikultura turun sebesar 0,28 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat turun 0,12 persen dan subsektor perikanan turun sebesar 0,69 persen.

Sementara itu, lanjut Zulkipli, harga gabah di tingkat petani dengan kualitas gabah kering giling (GKP) pada bulan Mei 2024 mengalami kenaikan sebesar 8,92 persen dibanding April 2024. Namun demikian harga gabah kualitas gabah kering giling (GKG) mengalami penurunan sebesar 1,11 persen.

Menurut Zulkipli, harga beras di tingkat penggilingan untuk semua kualitas pada bulan Mei 2024 mengalami penurunan dibanding April 2024. Rata-rata harga beras di penggilingan Jawa Timur turun 4,04 persen. "Beras kualitas Premium turun sebesar 3,27 persen, Medium turun 4,54 persen dan luar kualitas atau kualitas rendah turun sebesar 4,65 persen," pungkasnya. **(mus/nug)**

Title	Bupati Lepas Tim Pemeriksa Kesehatan Hewan Kurban	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Karawang Eksprebekasi	
Page	6	
Author	Adv	

Bupati Lepas Tim Pemeriksa Kesehatan Hewan Kurban



SEKILAS: Menjelang hari raya idhul adha 1445 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Karawang melepas 214 orang tim pemeriksaan hewan kurban di Bale Indung Nyi Pager Asih, Pemda Karawang pada Kamis, (6/6).

MENJELANG hari raya idhul adha 1445 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Karawang melepas 214 orang tim pemeriksaan hewan kurban di Bale Indung Nyi Pager Asih, Pemda Karawang pada Kamis, (6/6). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Rohman, beserta jajaran Forkompinda lainnya. Bupati Karawang Aep Syaepuloh menegaskan, agar para tim pemeriksaan hewan kurban ini bekerja semaksimal mungkin guna memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Lebih lanjut, Ia juga mengatakan jika memang nantinya ada hewan kurban yang ditemukan sakit harus segera ditangani. "Kalau pun nantinya memang terlihat sehat, tetap harus dipantau

kesehatannya. Dan jika memang terlihat kurang sehat, harus segera diberikan vitamin agar menjadi sehat," kata Aep, pada Kamis, (6/6/2024).

Ia juga menegaskan, jika penjual hewan kurban tetap ngeyel menjual hewan kurban yang sakit akan diberikan sanksi. "Kalaupun nanti ada temuan hewan kurban yang sakit, itu kita tegaskan untuk tidak dijual. Kalaupun memang masih membandel ada sanksinya," tegasnya.

"Karena tadi yang saya sebutkan, harus terus kita berikan treatment agar hewan kurban yang ada di karawang ini sehat-sehat semua," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala DPKP Karawang, Rohman menyampaikan, tujuan dibentuknya tim pemeriksaan hewan kurban ini untuk mendapatkan hewan kurban yang sehat dan layak

konsumsi sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114 tahun 2024.


"Mereka akan bertugas mulai dari H-10 sampai H-1 sebelum Idul Adha. Kemudian dilanjutkan lagi pada hari H untuk pemeriksaan setelah penyembelihan atau pemeriksaan di post mortem," ungkap Rohman.

Selain itu, Ia juga memaparkan jika hewan kurban yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksaan hewan kurban akan diberikan tanda dengan kalung sehat.

Dan Ia juga mengimbau agar masyarakat membeli hewan kurban yang sudah diperiksa oleh tim pemeriksaan hewan kurban.

"Nanti ada cirinya kalau yang sudah di cek oleh tim, itu ada kalung. Tapi ada juga yang bawaan langsung dari hewannya, biasanya ditelinga hewan kurban. Itu bisa dicek dan discan langsung," pungkasnya. (adv)



Title	Dukung Program Ketahanan Pangan Masyarakat	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Kedaulatan Rakyat	
Page	3	
Author	Jdm-f	

POLRI-PEMKAB BANTUL BUKA LAHAN BARU

Dukung Program Ketahanan Pangan Masyarakat

BANTUL (KR) - Polda DIY berkolaborasi dengan Pemkab Bantul membuka lahan pertanian baru di tanah wedi kengser tepi aliran Sungai Progo Ngentak Poncosari Srandakan Bantul seluas 7,2 hektare, untuk mendukung program ketahanan pangan masyarakat. Pembukaan lahan tersebut ditandai dengan tanam padi bersama Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih, Rabu (5/6).

"Pembukaan lahan baru untuk ditanami padi ini diawali dari inisiatif Polri, dalam upaya mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Bantul," jelas Bupati usai melakukan tanam padi bersama. Menurut Halim, lahan tidak produktif di tepi Sungai Progo seluas 7,2 hektare tersebut dicoba ditanami padi jenis varietas Inpari 32, salah satu benih kualitas unggul. "Padi varietas Inpari 32, diproyeksikan mampu

nyai produktivitas panen rata-rata 8,8 ton gabah kering panen (GKP) perhektare. Saya optimis, akan mendukung kesejahteraan petani terutama di wilayah Ngentak Poncosari," ungkapnya.

Bupati juga mengatakan, dalam produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Bantul tercatat bahwa sektor pertanian menempati rangking kedua setelah sektor industri. Jadi, sektor in-

dustri, pertanian dan pariwisata itu mempunyai kontribusi terhadap total produksi Kabupaten Bantul.

"Padi varietas Inpari 32 itu diproyeksikan mempunyai produktivitas panen rata-rata sebesar 8,8 ton gabah kering panen (GKP) perhektare. Ini pasti akan men-

dukung kesejahteraan petani terutama di wilayah Ngentak Poncosari," jelasnya.

Sementara Kapolres Bantul, AKBP Michael R Risakotta SIK, memaparkan kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Pertanian dengan Polri.

(Jdm)-f



KR-Judiman

Tanam padi bersama Bupati Bantul di lahan baru tanah wedi kengser Poncosari.

Title	Zulhas Nilai Harga Telur Terlalu Murah	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Tangerang Ekspres	
Page	10	
Author	Mama/tnt	



PEMROV BANTEN FOR TANGERANG EKSPRES

MENINJAU: Mendag Zulkifli Hasan didampingi Pj Gubernur Banten Al Muktabar meninjau harga dan ketersediaan bahan pokok di di Pasar Kelapa Blok F, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Kamis (6/6).

Zulhas Nilai Harga Telur Terlalu Murah

SERANG—Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) meninjau sejumlah harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Kelapa Blok F, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Kamis (6/6).

Dalam kunjungannya ke pasar, Zulhas mengatakan, harga beberapa komoditas jelang Idul Adha 2024 terbilang cukup stabil, apalagi untuk komoditas telur disebut terlalu murah. "Saudara lihat sendiri tadi, harga telur terlalu murah Rp27 ribu (perkilogram), tadi saya beli lima kilo harga Rp27 ribu terlalu murah itu," katanya kepada awak media.

Selanjutnya, untuk komoditas lainnya seperti daging ayam ras berada di harga Rp38 ribu perkilogram. Sementara bawang merah dan putih juga berada di kisaran Rp40 ribu perkilogram. "Cabe juga Rp 40 ribu (perkilogram)," ujarnya.


Sementara untuk komoditas beras, kata Zulhas harganya masih cukup stabil. Tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. "Cukup stabil, beras sama dan itu tidak ada kenaikan," terangnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku, Pemerintah akan terus menyalurkan stok beras di seluruh Indonesia guna memenuhi kebutuhan masyarakat. "Stok kita sekarang ada sekitar 1,8 juta, yang sudah diputuskan ada 3,6 juta impor, baru 2 koma sekian, nanti akan terus ditingkatkan persiapan cadangan andai nanti kemarau panjang seperti yang lalu," jelasnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Banten mengatakan, dirinya turut mendampingi Mendag RI Zulkifli Hasan saat meninjau harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Kelapa Blok F, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon.

Ia menjelaskan, Mendag langsung melakukan pengecekan terhadap sejumlah komoditi pokok yang berpengaruh terhadap inflasi daerah. Mulai dari harga cabai, bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, telur, beras dan komoditi lainnya. "Tadi saya juga menyampaikan untuk komoditi telur, kita terus melakukan komunikasi dengan pengusaha telur dan terlihat daya beli masyarakat juga cukup meningkat," katanya.

Selain itu, Al Muktabar juga menuturkan kunjungan Mendag Zulkifli Hasan ke salah satu pasar di Kota Cilegon sebagai salah satu upaya dalam memastikan ketersediaan dan harga sejumlah komoditi pangan menjelang Hari Raya Idul Adha 2024. "Kunjungan beliau ini juga karena kita dalam waktu dekat akan menyongsong Idul Adha, dan di pasar tadi memperlihatkan situasi bahan pokok terkendali dan stok cukup banyak," paparnya. (mam/tnt)

Title	Jamin Stok Hewan Kurban Aman dan Mencukupi	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Tangerang Ekspres	
Page	4	
Author	Sep/apw	



TERTARIK: Mentan RI Amran Sulaiman (dua dari kanan) menyimak penjelasan dari perwakilan PT LSAJ terkait sistem peternakan saat kunjungan di Kecamatan Jambé, Kabupaten Tangerang, Kamis (6/6/2024).

Jamin Stok Hewan Kurban Aman dan Mencukupi

Mentan Amran Kunjungi Pabrik Pakan Sapi

JAMBE—Jelang Hari Raya Kurban atau Idul Adha 1445 Hijriah, secara nasional, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran), menjamin ketersediaan hewan kurban aman dan mencukupi.

Hal tersebut ia sampaikan usai meninjau lokasi kandang sapi hingga pabrik pakan mini milik penggemukan sapi PT. Lembu Setia Abadi Jaya (LSAJ) Farm Tangerang.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), secara nasional, kebutuhan hewan kurban berada pada angka 1,97 juta ekor, dengan ketersediaannya yang mencapai 2,06 juta ekor, maka ketersediaan hewan kurban tahun ini berpotensi surplus hingga 88 ribu ekor.

Berdasarkan data tersebut, Mentan Amran memastikan

jumlah ketersediaan hewan kurban baik Sapi, Kerbau, Kambing maupun Domba untuk memenuhi kebutuhan nasional sangat mencukupi bahkan surplus. "Persiapan kurban Inshaallah aman, cukup sampai kita Idul Adha nanti, saya sudah terima laporannya, dan aman, jumlahnya sangat cukup" Ungkap Mentan Amran.

Lebih lanjut Mentan Amran menyebut saat ini pihaknya aktif memonitor ketersediaan hewan kurban di seluruh daerah. Tidak hanya sisi ketersediaan, dirinya mengaku juga fokus memastikan dari aspek


kesehatan.

Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah, ia memastikan pihaknya telah melakukan berbagai langkah penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kurban tahun ini.

"Kami memastikan sertifikat kesehatan ternak yang dilalulintaskan sudah lengkap, memeriksa ear tag untuk menjamin ternak telah teregister dan kami menerjunkan petugas kesehatan hewan di kabupaten dan kota untuk melakukan pengecekan

rutin di penampungan ternak," tuturnya saat mendampingi kunjungan Mentan Amran ke PT. Lembu Setia Abadi Jaya (LSAJ) Farm Tangerang.


Sebagai informasi, PT. Lembu Setia Abadi Jaya (LSAJ) Farm Tangerang memiliki luas area 22,5 hektar, kandang sapi, pabrik pakan mini berkapasitas 40 ton per hari, dan rencana pabrik pupuk, RPH, pabrik bakso, sosis, nugget, meat shop, serta cold storage. Bangunan kandang sapi PT. LSAJ memiliki kapasitas hingga 3.000 ekor dengan rencana perluasan hingga 10.000 ekor. (sep/apw)

Title	HARGA BERAS NAIK	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	11	
Author	Neraca	



NERACA/Anisrafoto/Asep Fathurahman/Spot

HARGA BERAS NAIK : Pekerja mengangkut beras di Pasar Induk Rau Serang, Banten, Rabu (5/6/2024). Menurut pedagang harga beras kualitas premium dan medium mengalami kenaikan Rp1.000 perkilogram akibat masa panen berakhir hingga suplai beras mulai berkurang.

Title	IFI 2024, Diharapkan Tingkatkan Daya Saing IKM Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	10	
Author	Gro/ant	

IFI 2024, Diharapkan Tingkatkan Daya Saing IKM Pangan

NERACA

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali menggelar Indonesia Food Innovation (IFI) 2024, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas bisnis dan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) sektor pangan.

"IFI 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan para pelaku IKM untuk mendapat pembinaan dan pendampingan yang tepat dari para ahli, sehingga dapat mengakselerasi bisnis mereka," kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kemenperin Reni Yanita, mengut-


tip laman Antara. Reni mengatakan bahwa program IFI menjadi penting untuk terus dilaksanakan, terlebih industri makanan dan minuman masih menjadi kontributor terbesar dalam sektor industri pengolahan nonmigas di Indonesia.

Pada triwulan I-2024, industri makanan dan minuman (mamin) berperan sebesar 39,91 persen atau 6,47 persen dari total produk domestik bruto (PDB) nasional. Nilai ekspor industri makanan pada April 2024 mencapai USD2,71 miliar, mencatatkan ekspor terbesar kedua setelah industri logam dasar. Sebagian besar dari nilai

tersebut merupakan kontribusi dari industri kecil menengah makanan dan minuman yang berjumlah sekitar 1,7 juta unit usaha dan menyerap tenaga kerja hampir 3,6 juta orang.

Meskipun menjadi industri padat karya dan penting bagi pemberdayaan masyarakat, IKM makanan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan modal, manajemen yang belum profesional, standar dan legalitas usaha yang belum terpenuhi, serta terbatasnya inovasi.

Pada sisi eksternal, IKM dihadapkan pada tantangan dalam menjalankan usahanya. ● gro/ant

Title	I-Pubers Mudahkan Petani Dapatkan Pupuk Subsidi	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	11	
Author	Gro/ant	

I-Pubers Mudahkan Petani Dapatkan Pupuk Subsidi

NERACA

Jakarta - PT Pupuk Indonesia (Persero) mengatakan aplikasi I-Pubers yang sudah diluncurkan secara nasional, memudahkan para petani untuk mendapatkan pupuk subsidi, karena hanya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke kios penyedia.

"Dengan mengimplementasikan aplikasi I-Pubers di lebih dari 27.000 kios pupuk, kami memastikan pupuk subsidi dapat ditebus oleh petani yang berhak sesuai alokasi yang telah ditetapkan. Sistem ini tidak hanya memudahkan proses penebusan, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengawasan distribusi pupuk bersubsidi," kata Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh, mengutip laman Antara.

Saleh menjelaskan petugas kios akan memindai KTP menggunakan aplikasi I-Pubers yang kemudian merekam transaksi, serta mengambil foto KTP, dan wajah petani dengan fitur geo-tagging, serta timestamp untuk verifikasi.

Menurut Saleh, mekanisme itu merupakan realisasi penyaluran pupuk yang berdasarkan data digital rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDCK), dengan batas alokasi yang sudah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah

daerah. Alokasi itu dirinci berdasarkan jenis pupuk, jumlah, dan sebaran wilayah, dengan mempertimbangkan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian (Kementan), Ali Jamil mengatakan, penyaluran pupuk menggunakan aplikasi I-Pubers yang membutuhkan KTP dan foto petani hanya ditujukan untuk verifikasi kecocokan data.

Melalui mekanisme tersebut, kios penyedia pupuk subsidi bisa menginput jumlah transaksi sesuai kebutuhan, sehingga para petani dapat menandatangani bukti transaksi secara elektronik melalui aplikasi tersebut.

"KTP ini akan difoto berikuk orang yang mengam-

bilnya menggunakan aplikasi I-Pubers. Bukti transaksi semua tersimpan secara digital," kata Ali.

Di sisi lain petugas di Kios Pupuk UD Lestari Abadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara Paijo mengatakan, sistem distribusi pupuk subsidi melalui aplikasi tersebut memudahkannya dalam melayani petani. Hal itu karena proses yang dilakukan sebatas memverifikasi data melalui KTP dan foto wajah.


"Sekarang petani cukup membawa KTP saja, prosesnya menjadi lebih mudah dan praktis," kata Paijo.

Pupuk Indonesia menyampaikan, bagi petani yang memenuhi syarat penerima pupuk subsidi namun tidak memiliki KTP, dapat mengunjungi pemerintah daerah atau kelu-

rahan setempat untuk mendapatkan bantuan.

Selain itu penebusan pupuk bersubsidi juga dapat diwakilkan oleh anggota keluarga dengan syarat membawa KTP yang mewakili, KTP petani, kartu keluarga, serta surat kuasa.

Sebelumnya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman minta jajarannya mensosialisasikan Permentan No 01 Tahun 2024 sebagai revisi Permentan No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Revisi ini untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi secara akurat dan tepat sasaran. Menurut Amran, pupuk merupakan komoditas yang penting dalam usaha mencapai ketahanan dan produksi pangan nasional. ●gro/ant

Title	Jelang Idul Adha, Plh Sekda Kabupaten Sukabumi Sidak Pasar	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Ron	

Jelang Idul Adha, Plh Sekda Kabupaten Sukabumi Sidak Pasar

NERACA

Sukabumi - Pastikan persediaan pangan menjelang idul adha 1544 H aman, Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabum, Toha Wildan Athoilah lakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Pasar Semi Modern (PSM) Cisaat, Kamis (06/06/2024).

Pada Sidak itu, Plh Sekda Toha Wildan Athoilah, Asisten Ekbang, pejabat Bulog Cabang Cianjur, pejabat Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian dan Bagian Ekonomi.

Sidak ini dilakukan guna memantau stabilitas pasar jelang Idul Adha, sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi bisa mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi terjadinya inflasi.

Toha menyebutkan pada Sidak itu, persediaan kebutuhan pokok di PSM Cisaat sangat mwnukupi. "Kami tidak menemukan adanya persediaan barang kebutuhan masyarakat yang persediaannya kurang," katanya.


Toha menerangkan pada Sidak itu, fokus pemantauan dititikberatkan pada komoditas seperti daging ayam dan sapi, bawang merah, minyak goreng, telur ayam, dan terigu.

Ia mengatakan pada komoditi tertentu ada flustuasi harga, tapi kenaikannya masih dalam batas wajar, serta pasokan masih lancar. Namun komoditi hingga kini masih belum ada perubahan harga.

Toha mengatakan komoditi seperti beras, gula pasir, dan daging sapi termasuk daging dan telur ayam negeri serta minyak goreng curah, belum ada perubahan harga.

Komoditi seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah besar, tepung terigu dan kentang, juga masih stabil dan terjangkau. "Tidak ada kenaikan dalam sepekan ini, masih normal," ujarnya.

Hanya saja, ujar dia, beberapa komoditi mengalami peningkatan permintaan dari konsumen. "Para pedagang mengaku ada beberapa komoditi yang meningkat permintaannya," katanya. ● ron

Title	Mentan Jamin Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	1	
Author	Mohar/ant	

Mentan Jamin Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

NERACA

Tangerang - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 1445 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada hari Senin tanggal 17-18 Juni 2024.

"Pangan aman, sekarang beras sudah stabil bahkan ada di bawah harga pokok penjualan (HPP)," ucap Mentan Amran di Tangerang, Kamis (6/6).

Menurut dia, kondisi ketersediaan pangan secara nasional dapat dipastikan aman dan terjamin. Dimana, hal tersebut terlihat dari pasokan dan harga pangan yang ada seperti beras, jagung serta yang lainnya dalam keadaan stabil.

"Kemudian jagung yang lima bulan lalu kita import tapi tiga hari yang lalu justru kita eksport. Jadi itu artinya pemerintah sudah bekerja maksimal," ujarnya.

Kementan juga saat ini, tengah

berupaya memfasilitasi dan menjaga ketersediaan pangan dari wilayah surplus. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar hasil panen tetap terserap pasar di tengah situasi konstitusional seperti ini.

Dalam hal ini, Mentan juga menyampaikan mengenai ketersediaan hewan kurban sebagai kebutuhan masyarakat pada Idul Adha.

Dimana, terdapat 2,06 juta ekor dengan terdiri atas sapi, kerbau, kambing, dan domba di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nantinya.

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pasokan hewan kurban yang mencapai 2,06 juta ekor dengan terdiri atas sapi, kerbau, kambing, dan domba di seluruh Indonesia untuk Idul Adha 2024 dipastikan aman dan mencukupi.

"Insha Allah aman. Dirjen sudah melapor ke saya, jadi dipastikan aman, jumlahnya juga cukup

untuk (Idul Adha)," ucap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat berkunjung ke Tangerang.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), secara nasional, kebutuhan hewan kurban berada pada angka 1,97 juta ekor, dengan ketersediaan mencapai 2,06 juta ekor. Maka ketersediaan hewan kurban tahun ini berpotensi surplus hingga mencapai angka 88 ribu ekor.

Kendati dari data tersebut, dipastikan jumlah ketersediaan hewan kurban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara nasional sangat mencukupi bahkan surplus.

"Jadi untuk persiapan kurban aman, 1 juta cukup, tapi yang terpenting ke depan kami akan kembangkan model peternakan lebih baik," katanya.

Kementerian Pertanian sendiri telah melakukan pemetaan akan kebutuhan berkurban untuk seluruh wilayah Indonesia mulai

dari yang defisit hingga surplus produksi peternakan.

Selain itu, pemerintah dalam hal ini siap melakukan intervensi apabila terjadi kekurangan kebutuhan kurban di daerah tertentu dengan cara memobilisasi produksi dari daerah surplus ke wilayah yang defisit.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan fokus memastikan dari aspek kesehatan hewan dengan melakukan berbagai langkah penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kurban tahun ini.

"Kami memastikan sertifikat kesehatan ternak yang dilalulintaskan sudah lengkap, memeriksa ear tag untuk menjamin ternak telah teregister dan kami menerjunkan petugas kesehatan hewan di kab/kota untuk melakukan pengecekan rutin di penampungan ternak," ujar dia.

Dalam hal ini, Mentan Amran melakukan pengecekan terhadap peternakan hewan milik PT Lem-


bu Setia Abadi Jaya (LSAJ) Farm Tangerang. Perusahaan peternakan hewan tersebut, memiliki luas area 22,5 hektar, dengan di isi kandang sapi, pabrik pakan mini berkapasitas 40 ton per hari, dan rencana pabrik pupuk, RPH, pabrik bakso, sosis, nugget, meat shop, serta cold storage. Bangunan kandang sapi PT. LSAJ memiliki kapasitas hingga 3.000 ekor dengan rencana perluasan hingga 10.000 ekor.

Kemudian Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan program pompanisasi yang diterapkan di Provinsi Jawa Barat (Jabar), bisa menjaga produktivitas padi di lahan sawah selama musim kemarau.

Mentan saat berada di Majalengka, Jabar, Kamis (6/6), mengatakan program pompanisasi merupakan salah satu solusi cepat dan tepat untuk melindungi lahan pertanian dari risiko kekeringan, sehingga produksi pangan di wilayah tersebut bisa lebih optimal. @mohar/ant

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Title	Pemkab Serang Pertahankan Lumbung Padi Jaga Stabilitas Harga Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Ant	

Pemkab Serang Pertahankan Lumbung Padi Jaga Stabilitas Harga Pangan

NERACA

Serang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mempertahankan lumbung padi untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang hari Raya Idul Adha 1445 H.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Nanang Supriatna, di Serang, dikutip Antara, kemarin, mengatakan harga pangan menjelang hari Raya Idul Adha akan tetap stabil mengingat beberapa bahan pangan di Kabupaten Serang mengalami surplus.

Salah satunya pada April 2024 panen raya padi dan beras mengalami surplus sehingga bisa menjadi penyumbang untuk daerah-daerah lain seperti Karawang dan sebagainya.


"Kita pertahankan lumbung padi yang ada di Kabupaten Serang, sehingga kita bisa stabil di komunitas padi atau beras. Dan di komunitas lain seperti sayuran, cabai, bawang, telur di Kabupaten Serang banyak ternak petelur yang juga bisa menyumbang untuk daerah lain," katanya.

Menurutnya, jika harga terkendali dan tidak terjadinya inflasi tentu ada penghargaan kinerja dari pemerintah pusat dengan mendapatkan intensif fiskal.

"Akan tetapi kita bukan hanya mengejar itu, yang paling penting bagaimana mengendalikan harga agar stabil," katanya.

Sebelumnya Kabupaten Serang menjadi salah satu lokus panen padi Nusantara 1 Juta hektare se-Indonesia di Kampung Pegadungan, Desa Tenjo Ayu, Kecamatan Tanara. Sehingga Kabupaten Serang mempunyai kontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Serang, Febrian Ripera mengatakan sembilan langkah yang dilakukan oleh Pemda dalam pengendalian inflasi daerah meliputi Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia dan melaksanakan rapat teknis TPID. ● ant

Title	Peternakan Inti-Plasma Tingkatkan Produksi Daging	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	10	
Author	Gro/ant	

Peternakan Inti-Plasma Tingkatkan Produksi Daging

NERACA

Majalengka - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan pola kemitraan inti-plasma dalam peternakan bisa diterapkan untuk meningkatkan produksi daging, yang nantinya berdampak terhadap kesejahteraan peternak di Indonesia.

"Kita sudah lihat peternakan sapi (milik PT Lembu Setia Abadi Jaya), itu 90 persen plasma dan 10 persen inti. Kambing juga demikian ke depan," kata Amran, menguip laman Antara.

Amran pun menjelaskan bahwa konsep kemitraan ini bisa melibatkan lebih banyak peternak lokal

yang bekerja sama dengan pengusaha, dalam meningkatkan produksi daging dalam negeri.

Menurut Amran, pola kemitraan inti-plasma sudah berhasil diterapkan pada kegiatan peternakan di Majalengka serta diharapkan semua daerah bisa mengaplikasikan konsep tersebut.

"Kalau ini kembangkan di seluruh Indonesia, kita bisa swasembada daging ke depan. Tapi kita memulai dulu. Kami mau mengundang (peternak dan pengusaha) khusus ke kantor untuk mengecek apa saja yang dibutuhkan dalam mengembangkan ini," ujar Amran.

Amran menjamin da-

lam dua pekan ke depan, Kementerian Pertanian bakal mengajak pengusaha serta peternak untuk membahas regulasi maupun kebijakan yang dibutuhkan guna mendukung program itu. Mentan memastikan bahwa pemerintah selalu memprioritaskan pelayanan terbaik bagi peternak, termasuk mempermudah proses perizinan yang diajukan untuk kegiatan usaha di sektor peternakan.

"Apa saja kebijakan dari pemerintah untuk mengakselerasi program ini, kami minta diseriusin dan dibantu. Jangan dipersulit. Misalnya untuk breeding dan seterusnya kami dukung penuh. Intinya sudah ada arah untuk Indonesia man-

diri daging," ungkap Amran.

Dukungan tersebut, lanjut Amran, sangat diperlukan karena potensi pasar untuk kebutuhan daging dalam negeri sangat tinggi dan seharusnya peternak lokal dapat memberikan kontribusi lebih.


Amran pun mencontohkan untuk memenuhi kebutuhan daging sapi, Indonesia masih harus mengimpor kurang lebih 600 ribu ton daging dengan nilai sekitar Rp20 triliun.

"Bayangkan kalau Rp20 triliun ini dipenuhi petani Indonesia, luar biasa. Ini baru daging sapi, berapa daging kambing dan daging ayam," terang Amran.

Amran menambahkan untuk meningkatkan pro-

duksi daging diperlukan pendekatan secara holistik, yang mempersiapkan semua hal dari hulu hingga hilir. Pendekatan semacam ini, menurut Amran, misalnya para peternak wajib memperhatikan kesehatan hewan sampai ketersediaan pakan tercukupi. Sehingga daging yang dihasilkan berkualitas dan bergizi.

"Jadi pendekatannya holistik. Dari hulu ke hilir. Tidak bisa parsial," ucap Amran. Lebih lanjut, Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong pengembangan potensi peternakan sapi potong di Kabupaten Sorong. ●gro/ant

Title	Produk Gula Kelapa Indonesia Didorong Masuk Pasar Australia	 Kementerian Pertanian
Date	7 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	11	
Author	Gro	

Produk Gula Kelapa Indonesia Didorong Masuk Pasar Australia

Canberra - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Atase Perdagangan (Atdag) RI di Canberra kembali mendorong perluasan pasar produk Indonesia di wilayah Australia. Salah satunya dengan memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerja sama antara Global Coco Sugar, produsen gula kelapa asal Indonesia, dengan Import United Ausindo Pty Ltd, sebagai agen eksklusif Global Coco Sugar untuk pemasaran di wilayah Australia, Selandia Baru, dan Kepulauan Pasifik.

■ NERACA

Atdag RI di Canberra Agung Haris Setiawan mengungkapkan, "penandatanganan ini diharapkan dapat mendukung upaya Kementerian Perdagangan meningkatkan ekspor produk Indonesia ke Australia, Selandia Baru, dan Kepulauan Pasifik.

Haris menambahkan, pemerintah berkomitmen untuk mendukung serta menjembatani para pelaku usaha kedua negara untuk melakukan kerja sama serupa di masa mendatang, sehingga akan memperluas pasar produk Indonesia.

Menurut Haris, perjanjian kerja sama ini akan memperluas jangkauan produk Global Coco Sugar serta memenuhi permintaan gula kelapa berkualitas tinggi yang meningkat di pasar global.

Di sisi lain, Import United Ausindo merupakan perusahaan impor Australia yang telah memiliki pengalaman dalam mempromosikan berbagai produk dan memiliki jaringan distribusi di Australia, Selandia Baru, dan Kepulauan Pasifik.

Lebih lanjut, Kemendag dan Atdag terus berupaya mendorong para pelaku usaha produk pertanian Indonesia memasuki pasar Australia. Hal ini merupakan bagian dari implementasi hubungan ekonomi Indonesia dan Australia sejak berlakunya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada 2020 lalu.

"Dalam upaya tersebut, Kemendag menggandeng perusahaan Indonesia asal Jawa Timur PT Energi Sterila Higiene untuk mengambil langkah penting dengan mengajukan permohonan persetujuan menjadi penyedia jasa iradiasi produk pertanian kepada pemerintah Australia," tambah Haris.

Terkait hal ini, lanjut Haris, pihaknya di Australia siap membantu produk pertanian Indonesia memasuki pasar internasional, khususnya pasar Australia. "Sebab, produk pertanian unggulan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar," jelas Haris.

Haris pun membenarkan bahwa minat terha-

dap produk pertanian Indonesia, termasuk manggis, cukup tinggi di pasar internasional.

Nilai ekspor manggis Indonesia mencapai sekitar USD 75 juta pada 2022.

Namun, aturan biosekuriti yang ketat masih menjadi hambatan utama bagi Indonesia untuk memasuki pasar Australia. Inisiatif baru ini diharapkan akan membuka peluang bagi petani dan eksportir manggis asal Indonesia untuk memasuki pasar baru yang lebih luas dan potensial di negara ketiga.

"Kemendag melalui Atase Perdagangan RI di Canberra, bersama dengan PT Energi Sterila Higiene, Katalis, dan Pemerintah Australia, berkomitmen untuk mewujudkan kesuksesan dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia," jelas Haris.

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Pahala Nugraha mendorong terciptanya neraca perdagangan yang lebih berimbang. Oleh karena itu, pihaknya mengajak kedua negara untuk mengoptimalkan implementasi IA-CEPA di antaranya dengan mengatasi hambatan non-tarif untuk komoditas Indonesia, seperti produk perikanan dan buah-buahan melalui kerja sama saling keberterimaan.

Sementara itu, Direktur Global Coco Sugar Rifqi Hermawan menambahkan, pihaknya sangat berharap perjanjian ini akan memberikan manfaat besar terhadap distribusi produknya.

"Kami memberikan apresiasi kepada Import United Ausindo dan Atdag

Canberra atas penandatanganan kerja sama ini. Semoga kemitraan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua perusahaan dan pada 2028 akan mencapai target penjualan sebesar USD 2 juta," ujar Rifqi yang juga akan berpartisipasi pada Trade Expo Indonesia (TEI) 2024 nanti.

Manajer Umum Import United Ausindo, Fikri Azis sangat terkesan dengan kualitas produk dan komitmen Global Coco Sugar terhadap keberlanjutan.

"Kami yakin bahwa produk Global Coco Sugar akan diterima dengan baik oleh pelanggan kami, dan kami berharap dapat mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan untuk tahun-tahun mendatang," jelas Fikri.

Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama tiga tahun awal dengan opsi untuk diperpanjang sesuai dengan evaluasi yang akan dilakukan. Nantinya, Import United Ausindo akan menerima komisi atas semua penjualan langsung dan tidak langsung berdasarkan perjanjian tersebut.

Penandatanganan dilakukan secara hibrida dengan dukungan PrivyID selaku perusahaan penyelenggara sertifikat elektronik tersertifikasi dan penyelenggara tanda tangan elektronik yang dilakukan secara aman dan mudah walau berbeda negara.

Metode penandatanganan melalui PrivyID akan dilanjutkan pada TEI 2024 khususnya bagi pihak buyer yang tidak memungkinkan hadir secara langsung, namun ingin mendapatkan legalitas yang sama. ● gro

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN